

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber

Telp. (0231) 321197-321792 Fax. (0231) 321025

Website : <http://setda.cirebonkab.go.id>

Kata Pengantar



Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu bulan Januari 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Cirebon Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Pelaporan LKIP Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2022 disajikan juga melalui website Pemerintah Kabupaten Cirebon *www.cirebonkab.go.id*, serta akan disampaikan juga ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi E-SAKIP Reviu (*esr.menpan.go.id*).

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Cirebon, Maret 2023

PUPATI CIREBON,

IMRON

Ikhtisar Eksekutif

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

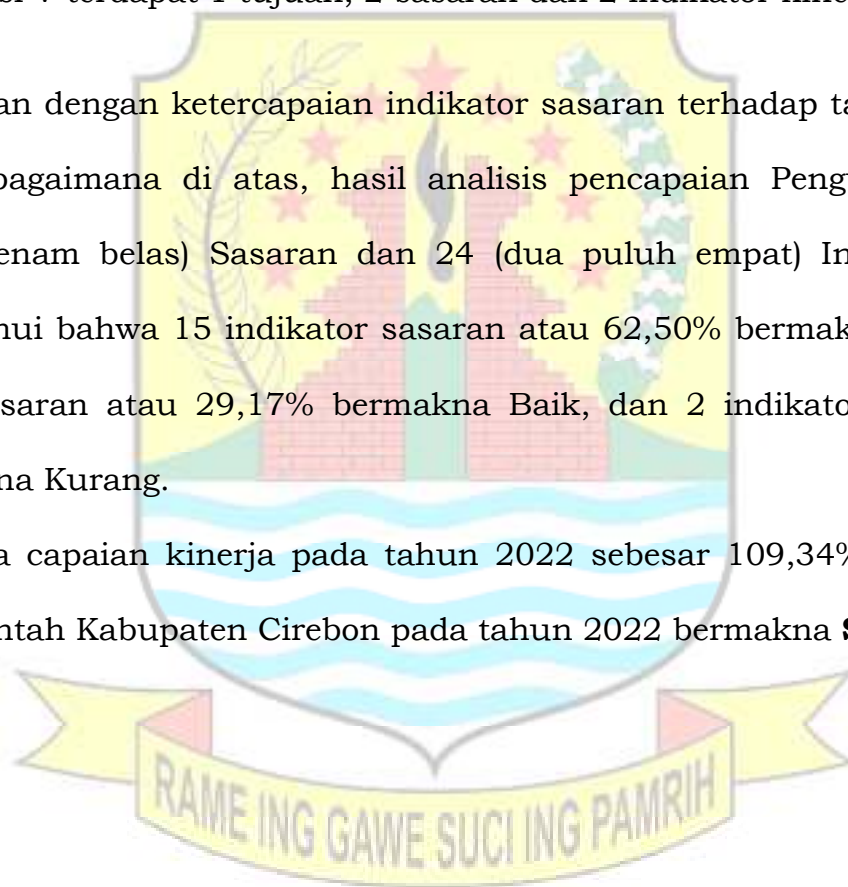
Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 050/Kep.595-Bappelitbangda/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, untuk mewujudkan Visi lima tahun kedepan telah ditetapkan 5 Misi, 7 Tujuan, 16 Sasaran Strategis dan 24 Indikator Kinerja Utama.

Adapun pencapaian untuk masing-masing indikator sasaran untuk tahun perencanaan 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- Misi I terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja;
- Misi II terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 5 indikator kinerja;
- Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja;
- Misi IV terdapat 2 tujuan, 8 sasaran dan 15 indikator kinerja;
- Misi V terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 16 (enam belas) Sasaran dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 15 indikator sasaran atau 62,50% bermakna Baik Sekali, 7 indikator sasaran atau 29,17% bermakna Baik, dan 2 indikator sasaran atau 8,33% bermakna Kurang.

Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 109,34%, Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 bermakna **Sangat Baik**.



DAFTAR ISI

	Hal.	
Kata Pengantar	i	
Ringkasan Eksekutif	ii	
Daftar Isi	v	
Daftar Gambar	vii	
Daftar Tabel	viii	
Daftar Grafik	xi	
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Gambaran Umum Kabupaten Cirebon	2
1.2.1.	Kondisi Geografis	2
1.2.2.	Kondisi Demografis	7
1.3.	Pertumbuhan Ekonomi	12
1.4.	Kondisi Pemerintahan	16
1.5.	Jumlah Aparatur Sipil Negara	19
1.6.	Isu Strategis	21
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	35
2.1.	Rencana Strategis Tahun 2019–2024	35
2.1.1.	Visi	36
2.1.2.	Misi	37
2.2.	Indikator Kinerja Utama	41
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	44
3.1.	Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022	44
3.2.	Analisis Pengukuran Kinerja	48
1.	Analisis kinerja sasaran: "Meningkatnya Jati Diri dan Nilai-Nilai Luhur Masyarakat Cirebon"	48
2.	Analisis kinerja sasaran: "Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat"	52
3.	Analisis kinerja sasaran: "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat"	57
4.	Analisis kinerja sasaran: "Menurunnya Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengalami Disfungsi Sosial"	60
5.	Analisis kinerja sasaran: "Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja"	62
6.	Analisis kinerja sasaran: "Meningkatnya Penyelesaian Pergesekkan (Friksi) Antar dan Internal Umat Beragama"	64
7.	Analisis kinerja sasaran: "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan"	66
8.	Analisis kinerja sasaran: "Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat"	69
9.	Analisis kinerja sasaran: "Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah"	71
10.	Analisis kinerja sasaran: "Meningkatnya Kualitas	79

	Lingkungan Hidup*	
11.	Analisis kinerja sasaran: "Meningkatnya Kapasitas Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik"	83
12.	Analisis kinerja sasaran: "Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik dan Bersih"	88
13.	Analisis kinerja sasaran: "Meningkatnya Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik"	93
14.	Analisis kinerja sasaran: "Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa"	96
15.	Analisis kinerja sasaran: "Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban"	98
16.	Analisis kinerja sasaran: "Menurunnya Resiko Bencana"	100
3.3.	Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022	102
3.3.1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	103
3.3.2.	Pengelolaan Belanja Daerah	105
3.3.3.	Kondisi Pembiayaan Daerah	107
BAB IV	PENUTUP	109

Lampiran :

1. Data Prestasi dan Penghargaan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022
2. Pernyataan telah direvisi oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon.
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
4. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Administrasi Kabupaten Cirebon	4
Gambar 1.2.	Kantor Bupati Cirebon	16
Gambar 1.3.	ASN Setda Kabupaten Cirebon	20
Gambar 1.4.	Leja Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon	28



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Cirebon	5
Tabel 1.2.	Jumlah penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Cirebon Tahun 2022	8
Tabel 1.3.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon Per Kecamatan Tahun 2022	8
Tabel 1.4.	Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian Kabupaten Cirebon Tahun 2022	10
Tabel 1.5.	Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2022	10
Tabel 1.6.	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon Tahun 2022	11
Tabel 1.7.	Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon	16
Tabel 1.8.	Kecamatan di Kabupaten Cirebon	17
Tabel 1.9.	Kelurahan di Kabupaten Cirebon	19
Tabel 1.10.	Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon berdasarkan data SIMPEG Tahun 2022	19
Tabel 1.11.	Jumlah ASN berdasarkan Ruang/Golongan	20
Tabel 2.1.	Penjabaran Misi dalam Tujuan Pembangunan Daerah Beserta Indikator dan Target	38
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022	40
Tabel 2.3.	Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022	42
Tabel 3.1.1.	Pencapaian Indikator Sasaran	47
Tabel 3.1.2.	Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	47
Tabel 3.2.1.	Realisasi Capaian Indikator Sasaran “Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon”	49
Tabel 3.2.2.	Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD	49
Tabel 3.2.3.	Program dan Anggaran sasaran “Meningkatnya jati diri dan Nilai-Nilai Luhur Masyarakat Cirebon”	50
Tabel 3.2.4.	Realisasi Capaian Indikator Sasaran “Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat”	53
Tabel 3.2.5.	Program dan Anggaran sasaran “Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat”	55
Tabel 3.2.6.	Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD	57
Tabel 3.2.7.	Realisasi Capaian Indikator Sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”	58
Tabel 3.2.8.	Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD	58
Tabel 3.2.9.	Program dan Anggaran sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”	58
Tabel 3.2.10.	Realisasi Capaian Indikator Sasaran “Menurunnya Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengalami Disfungsi Sosial”	60
Tabel 3.2.11.	Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD	60
Tabel 3.2.12.	Program dan Anggaran sasaran “Menurunnya Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengalami Disfungsi Sosial”	61
Tabel 3.2.13.	Realisasi Capaian Indikator Sasaran “Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja”	62

Tabel 3.2.14	Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD	63
Tabel 3.2.15	Program dan Anggaran sasaran "Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja"	63
Tabel 3.2.16	Realisasi Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Penyelesaian Pergesekan (Fiksi) Antar dan Internal Umat Beragama"	64
Tabel 3.2.17	Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD	65
Tabel 3.2.18	Program dan Anggaran sasaran "Meningkatnya Penyelesaian Pergesekan (fiksi) Antar dan Internal Umat Beragama"	65
Tabel 3.2.19	Realisasi Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan"	67
Tabel 3.2.20	Program dan Anggaran sasaran "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan"	67
Tabel 3.2.21	Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD	68
Tabel 3.2.22	Realisasi Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat"	69
Tabel 3.2.23	Program dan Anggaran sasaran "Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat"	70
Tabel 3.2.24	Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD	71
Tabel 3.2.25	Realisasi Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah"	71
Tabel 3.2.26	Program dan Anggaran sasaran "Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah"	73
Tabel 3.2.27	Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD	73
Tabel 3.2.28	Realisasi Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"	79
Tabel 3.2.29	Realisasi IKLH Kabupaten Cirebon	80
Tabel 3.2.30	Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD	81
Tabel 3.2.31	Program dan Anggaran sasaran "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"	81
Tabel 3.2.32	Realisasi Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Kapasitas Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik"	83
Tabel 3.2.33	Peningkat hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2022	84
Tabel 3.2.34	Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD	85
Tabel 3.2.35	Program dan Anggaran sasaran "Meningkatnya Kapasitas Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik"	86
Tabel 3.2.36	Realisasi Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik dan Bersih"	88
Tabel 3.2.37	Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD	92
Tabel 3.2.38	Program dan Anggaran sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik dan Bersih"	93
Tabel 3.2.39	Realisasi Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik"	94

Tabel 3.2.40	Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD	95
Tabel 3.2.41	Realisasi Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa"	96
Tabel 3.2.42	Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD	97
Tabel 3.2.43	Program dan Anggaran sasaran "Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa"	97
Tabel 3.2.44	Realisasi Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban"	98
Tabel 3.2.45	Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD	99
Tabel 3.2.46	Realisasi Capaian Indikator Sasaran "Menurunnya Risiko Bencana"	100
Tabel 3.2.47	Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD	101
Tabel 3.2.48	Program dan Anggaran sasaran "Menurunnya Risiko Bencana"	101
Tabel 3.3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 Per 31 Desember 2022	105
Tabel 3.3.2	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Per 31 Desember 2022	106
Tabel 3.3.3	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 Per 31 Desember 2022	108



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Distribusi Perkeonomian Kabupaten Cirebon 2018-2022	12
Grafik 1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Cirebon 2023-2023	14
Grafik 1.3	Data Th. 2022 untuk PDRB dan LPE hasil proyeksi Happpelabangsa	15
Grafik 3.1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cirebon 2017-2022	51
Grafik 3.2	Tingkat kemiskinan tahun 2022	61
Grafik 3.3	Hasil pengukuran IKLI 2020-2022 Kabupaten Cirebon	81



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Cirebon

1.2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Cirebon secara geografis berada pada posisi 108°19'30"-108°50'03" Bujur Timur (BT) dan 6°30'58"- 7°00'24" Lintang Selatan (LS).

Secara administratif, Kabupaten Cirebon memiliki wilayah seluas 990,36 km² yang meliputi 40 Kecamatan, terbagi menjadi 412 Desa dan 12 Kelurahan, 2.700 Rukun Warga (RW), dan 9.377 Rukun Tetangga (RT).

Adapun batas-batas administratif Kabupaten Cirebon adalah:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa;
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan;
3. Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka;

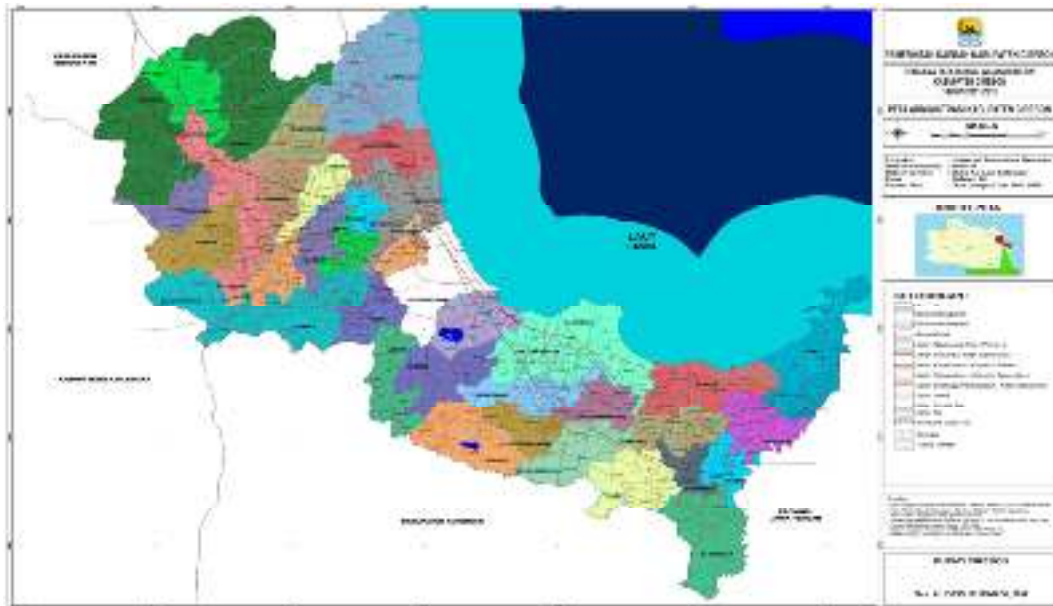
4. Sebelah Timur : Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes (Provinsi Jawa Tengah).

Secara geo-ekonomi, Kabupaten Cirebon memiliki posisi yang strategis (*geo-strategic*) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- a) Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan potensi bagi pengembangan Kabupaten Cirebon untuk menarik investor ke wilayah ini;
- b) Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang merupakan jalur utama distribusi barang dan jasa, dan mobilisasi orang tingkat regional dan nasional;
- c) Kabupaten Cirebon memiliki akses jalur transportasi utama wilayah Pantai Utara Jawa yaitu ruas jalan bebas hambatan (jalan tol) (ruas jalan tol Palimanan-Kanci/Palikanci, dan ruas jalan tol Kanci-Pejagan). Selain itu, Kabupaten Cirebon dilalui oleh jalur kereta api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya);
- d) Kabupaten Cirebon menjadi lokasi sumber energi jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Electric Power (CEP) di Kecamatan Astanajapura;

- e) Kabupaten Cirebon menjadi bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) wilayah Cirebon sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Cirebon



Secara topografis, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian antara 0-130 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah kecamatan yang terletak sepanjang jalur Pantura termasuk pada dataran rendah yang memiliki ketinggian antara 0-10 mdpl meliputi 10 kecamatan yaitu Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, Gunungjati, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Gebang, Losari, dan Pabedilan. Sementara, 30 kecamatan lainnya berada pada ketinggian antara 11-30 mdpl. Adapun pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dibedakan sebagai berikut :

- 1) Wilayah berketinggian antara 0-25 mdpl seluas 64.636 Ha atau 65,31% dari luas Kabupaten Cirebon;

- 2) Wilayah berketinggian antara 25-50 mdpl seluas 1.525,20 Ha atau 10,65% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 3) Wilayah berketinggian antara 50-100 mdpl seluas 10.196,40 Ha atau 10,30% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 4) Wilayah berketinggian antara 100-200 mdpl seluas 61.150 Ha atau 6,21% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 5) Wilayah berketinggian antara 200-300 mdpl seluas 4.275,55 Ha atau 4,32% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 6) Wilayah berketinggian 300 mdpl seluas 2.180,20 Ha atau 2,20% dari luas Kabupaten Cirebon;

Berdasarkan konturnya, Kabupaten Cirebon memiliki kemiringan antara 0-40%. Untuk lebih jelasnya, tingkat kemiringan wilayah dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1

Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Cirebon

No	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 – 8 %	88.075, 71	88,93
2	>8 – 15 %	2.598, 48	2,62
3	>15 – 25 %	5.152, 05	5,2
4	>25 – 40 %	1.853, 52	1,87
5	>40 %	1356, 24	1,37
Jumlah		99.036	100

Sumber: Cirebon Dalam Angka, Tahun 2022

Secara geologis, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki delapan jenis struktur tanah, yaitu Aluvial (Qa) seluas 52.224 ha (52,76%), hasil gunung api muda yang tak terurai (Qyu) seluas 33.740 ha (34,10%), breksi kompleks Kromong (Qvk) seluas 1.110 ha (1,12%), batu gamping kompleks Kromong (MI) seluas 202,60 ha, formasi Kaliwungu (Pk) seluas 8.964,20 ha (9,06%),

formasi Cijulang (Tpel) seluas 825 ha (0,83%), formasi Kalibiuk (Tpb) seluas 1.345 ha (1,36%), dan hasil gunung api tua yang tak terurai (Qvu) seluas 560 ha (0,63%). Berdasarkan jenis tanahnya, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki sembilan jenis tanah yaitu alluvial, regosol, litosol, grumosol, mediteran, latasol, podsolik, regosol, dan glei humus. Secara umum, jenis-jenis tanah tersebut sesuai untuk kegiatan pertanian (sawah dan palawija), dan kegiatan perikanan.

Secara hidrologis, wilayah Kabupaten Cirebon meliputi air tanah dan air permukaan, dimana jumlah air permukaan 1.418,83 juta meter kubik (m³). Sebaran air tanah di wilayah Kabupaten Cirebon diklasifikasikan menjadi air tanah asin, air tanah dangkal, air tanah sedang, dan air tanah langka. Adapun berdasarkan jenis, air tanah dibedakan menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Sementara, jenis air permukaan meliputi sungai, danau/situ dan mata air. Volume debit air sebagaimana yang tertuang diatas pemanfaatannya meliputi untuk kebutuhan-kebutuhan domestik 6,5 juta m³ , industri 5,184 juta m³, irigasi 1.046 juta m³, budi daya perikanan 81,3 juta m³ .

Secara klimatologis, berdasarkan klasifikasi *Schmidt* dan *Ferguson*, Kabupaten Cirebon beriklim tipe C dan D. Daerah dengan kategori ini mempunyai ciri iklim tropis, suhu antara 24°C sampai 36°C dengan suhu rata-rata 28°C. Kabupaten Cirebon memiliki curah hujan antara 0-3.317 milimeter (mm) dengan rata-rata jumlah curah hujan sebanyak 1.265,15 mm. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Dukupuntang (3.317 mm) dan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Suranenggala (136 mm).

Secara kewilayahan, infrastruktur wilayah memiliki peran strategis dalam peningkatan struktur perwilayahan, mendukung distribusi barang, jasa dan

mobilitas orang. Untuk mendukung peran tersebut, infrastruktur memerlukan pengembangan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan yang diarahkan pada lima Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Cirebon yaitu PKL Sumber, PKL Ciledug, PKL Lemahabang, PKL Palimanan dan PKL Arjawinangun.

Infrastruktur wilayah meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, listrik, telepon dan sarana lain seperti sarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Kebutuhan infrastruktur wilayah tersebut terkait dengan fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, dimana dengan kondisi infrastruktur perbatasan yang baik maka dapat menjadi faktor penarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Cirebon.

1.2.2 Kondisi Demografis

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon tahun 2022 mencapai **2.380.074** jiwa. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 2.141 jiwa/km² dari luas wilayah sebesar 1.070,29 km². kepadatan penduduk di 40 kecamatan cukup beragam dengan tertinggi terletak di kecamatan Weru dengan kepadatan sebesar 7.739 jiwa/km² dan terendah di kecamatan sebesar 646 jiwa/km²

Tabel 1.2
Jumlah penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Cirebon Tahun 2022

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 4	102.176	96625	198.801
2.	5 - 9	88.462	83371	171.833
3.	10 - 14	88.877	83698	172.575
4.	15 - 19	93.482	88029	181.511
5.	20 - 24	103.726	99212	202.938
6.	25 - 29	103.287	96104	199.391
7.	30 - 34	103.809	98456	202.265
8.	35 - 39	96.614	95489	192.103
9.	40 - 44	90.545	89277	179.822
10.	45 - 49	77.499	76937	154.436
11.	50 - 54	64.445	65122	129.567
12.	55 - 59	50.993	52316	103.309
13.	60 - 64	40.206	41415	81.621
14.	65 - 69	29.298	30107	59.405
15.	70 - 74	16.874	18242	35.116
16.	>75	11.572	14702	26.274
Jumlah		1.206.418	1.173.655	2.380.074

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 1.3
Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon Per Kecamatan
Tahun 2022 (jiwa/km²)

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km ²	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)		
			2020	2021	2022*)
1.	Waled	30,79	1.776	1.819	1.829
2.	Pasaleman	41.31	664	642	646
3.	Ciledug	14,63	3.162	3.117	3.140
4.	Pabuaran	9,57	3.797	3.841	3.872
5.	Losari	45,32	1.324	1.376	1.394
6.	Pabedilan	25,82	2.085	2.254	2.280
7.	Babakan	22,18	3.044	3.214	3.255

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km ²	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)		
			2020	2021	2022*)
8.	Gebang	35,36	1.773	1.919	1.949
9.	Karangsembung	18,82	1.963	1.939	1.949
10.	Karangwareng	27,19	1.060	1.050	1.057
11.	Lemahabang	22,65	2.377	2.453	2.474
12.	Susukan Lebak	18,05	2.207	2.280	2.302
13.	Sedong	34,43	1.181	1.229	1.237
14.	Astanajapura	28,91	2.679	2.763	2.777
15.	Pangenan	35,73	1.242	1.312	1.322
16.	Mundu	27,40	2.751	2.964	2.992
17.	Beber	25,75	1.566	1.717	1.748
18.	Greged	32,22	1.728	1.763	1.781
19.	Talun	19,31	3.492	3.701	3.746
20.	Sumber	29,54	2.823	3.274	3.330
21.	Dukupuntang	37,44	1.718	1.736	1.747
22.	Palimanan	19,12	3.224	3.239	3.272
23.	Plumbon	19,03	4.127	4.326	4.373
24.	Depok	16,38	3.844	4.044	4.102
25.	Weru	9,11	7.609	7.677	7.739
26.	Plered	13,23	4.028	4.165	4.194
27.	Tengah Tani	9,76	4.352	4.655	4.707
28.	Kedawung	11,25	5.755	5.416	5.414
29.	Gunung Jati	22,45	3.575	3.672	3.691
30.	Kapetakan	67,04	817	910	924
31.	Suranenggala	25,73	1.658	1.791	1.809
32.	Klangenan	20,42	2.597	2.593	2.601
33.	Jamblang	16,59	2.353	2.305	2.322
34.	Arjawinangun	24,29	2.784	2.912	2.945
35.	Panguragan	22,00	1.998	1.964	1.966
36.	Ciwaringin	16,10	2.485	2.384	2.385
37.	Gempol	30,72	1.480	1.505	1.514
38.	Susukan	52,05	1.246	1.314	1.325
39.	Gegesik	63,83	1.126	1.087	1.086
40.	Kaliwedi	28,77	1.354	1.422	1.439
Jumlah		1.070,29	2.146	2.122	2.141

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2022

Penduduk Kabupaten Cirebon sebagian besar bermata pencaharian Bidang Wiraswasta yang mendominasi keseluruhan jumlah penduduk yaitu mencapai

676.964 jiwa atau 28,44% dari jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian Kabupaten Cirebon tahun 2022 sebesar 2.380.074 jiwa. Secara terperinci jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan mata pencaharian, diuraikan dalam table berikut :

Tabel 1.4
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian
Kabupaten Cirebon Tahun 2022

No.	Status Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1.	BELUM/TIDAK BEKERJA	564.914	23,74
2.	PEGAWAI NEGERI SIPIL	28.893	1,21
3.	TENAGA PENGAJAR	11.318	0,48
4.	WIRASWASTA	676.964	28,44
5.	PERTANIAN/PETERNAKAN	73.056	3,07
6.	NELAYAN	15.155	0,64
7..	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	239	0,01
8.	PELAJAR/MAHASISWA	399.356	16,78
9.	TENAGA KESEHATAN	3.460	0,15
10.	PENSIUNAN	7.464	0,31
11.	LAIN-LAINNYA	599.255	25,18
	Jumlah	2.380.074	100.00

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Cirebon

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok tingkat pendidikan masih didominasi oleh kelompok pendidikan Tingkat SD/Sederajat yaitu sebesar 749.480 atau 32 % dari jumlah penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun 2022 sebesar 2.365.048 jiwa, secara rinci dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5
Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kabupaten Cirebon Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Belum Sekolah	484.861	20,37
2.	Belum Tamat SD	268.812	11,29
3.	SD/Sederajat	746.909	31,38
4.	SLTP/Sederajat	367.179	15,43
5.	SLTA/Sederajat	424.663	17,84

6.	Diploma 1,2,3	4.596	0,19
7.	Strata 1/D4	60.746	2,55
8.	Strata 2	2.734	0,11
9.	Strata 3	152	0,01
	Jumlah	2.380.074	100%

Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 mencapai 64,49%, yang berarti bahwa pada setiap 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sekitar 63 orang di antaranya adalah termasuk angkatan kerja. TPAK tahun 2022 ini mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2021 yakni sekitar 1,01%. Semakin tinggi angka TPAK maka semakin besar penyediaan tenaga kerja, dan secara otomatis kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan perekonomian semakin cepat, karena berkaitan dengan seberapa besar produktivitas yang dihasilkan oleh para pekerja tersebut. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sebagai catatan bahwa persentase angkatan kerja yang ditampilkan tidak lain adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) itu sendiri. Bisa dilihat kondisi ketenagakerjaan pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon Tahun 2022

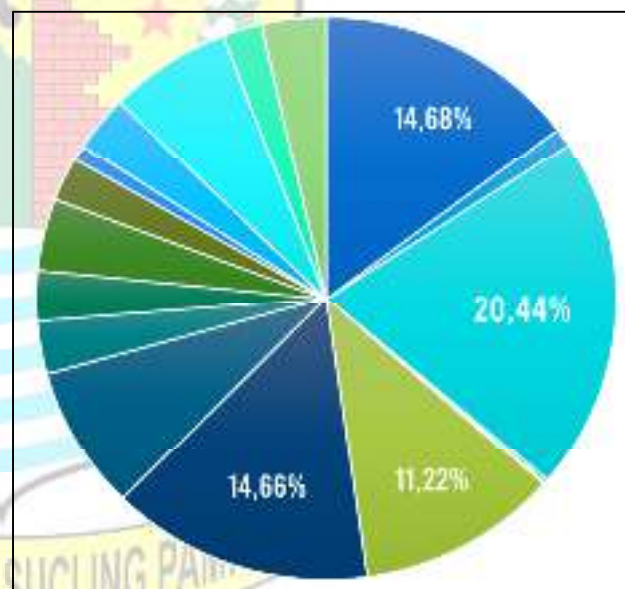
Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,38	63,79	64,49
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,28	11,52	10,38
Bekerja (jiwa)	955,506	938,217	970.262

Sumber :BPS Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2022

1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Melambatnya perekonomian nasional, Kabupaten Cirebon tetap optimis dengan laju positif perekonomian daerah. Dalam APBD 2022 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 berada pada posisi 5,15% hingga 5,51%. Berdasarkan kerangka ekonomi makro yang telah dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, APBD tahun 2022 disusun sebagai upaya pemerintah melakukan berbagai langkah, antara lain mendorong ekonomi, meningkatkan kinerja perbankan, meningkatkan gerak dan transaksi ekonomi. Oleh karena itu seluruh proyeksi baik pendapatan, belanja, dan pembiayaan diharapkan dapat secara efektif menstimulasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Arah pembangunan Kabupaten Cirebon pada 2022 akan diatensikan kepada 8 (delapan) prioritas untuk percepatan

Grafik 1. Distribusi Perekonomian Kabupaten Cirebon 2018-2022



pemulihan perekonomian dan mencetak sumber daya manusia (SDM) berkompeten. Delapan prioritas tersebut yakni, peningkatan akses pendidikan, peningkatan jaminan kesehatan, penyediaan infrastruktur wilayah untuk layanan dasar, pengembangan ekonomi kerakyatan (pariwisata dan pertanian). Kemudian, penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan

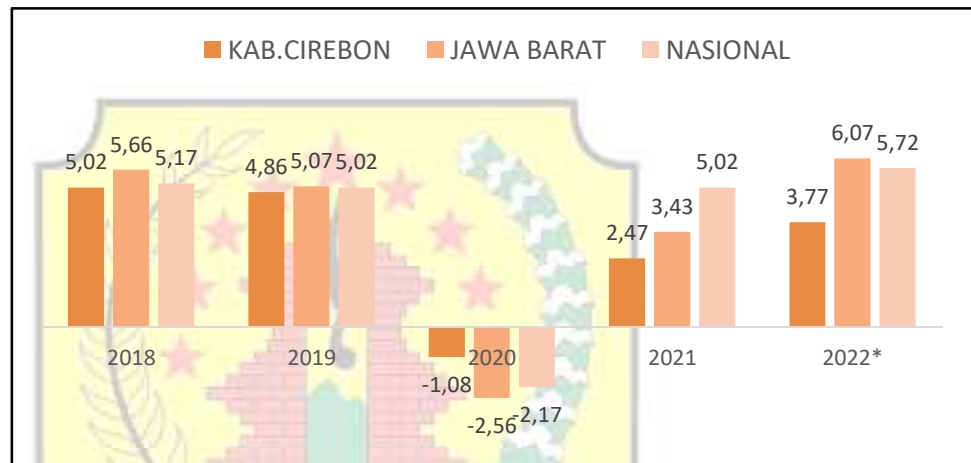
reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima. Untuk mencapai sasaran pembangunan dan kapasitas fiskal yang semakin kuat, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan, menggali mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah secara menyeluruh dan profesional.

Selain daripada itu, Kabupaten Cirebon juga akan mengubah strategi ekonominya yaitu dengan menciptakan destinasi wisata dan *spot-spot selfie* baru, serta terus menyempurnakan kemasan Cirebon Festival sebagai daya tarik dan ajang promosi budaya Cirebon untuk mengerek *traffic* wisatawan yang ujungnya akan mampu menggerakkan ekonomi daerah. Salah satu strategi yang diterapkan agar roda perekonomian tetap meningkat yaitu dengan melihat tingginya tingkat hunian hotel akibat kunjungan wisatawan dan penggunaan jasa transportasi. Saat kunjungan tinggi, hotel-hotel akan mengalami *high season*. Ini biasa terjadi pada akhir tahun, karena banyak instansi yang menggelar pertemuan di Kabupaten Cirebon dan sebaliknya, saat awal tahun banyak hotel yang mengalami *low season*. Kondisi ini akan coba dikendalikan dengan menggeser beberapa even Cirebon Festival ke waktu-waktu *low season*. Sehingga, saat sedikit instansi yang menggelar *meeting* ke Cirebon, hunian hotel tetap bisa tinggi yaitu dengan hadirnya wisatawan yang ingin menyaksikan gelaran Cirebon Festival.

Belanja daerah tahun anggaran 2022 dilaksanakan dan diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak pada kepentingan publik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga penggunaannya harus mengedepankan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan

prioritas. Dari keseluruhan program pembangunan, sektor ekonomi menjadi fokus utama yang digenjot pertumbuhannya, sebab sektor ini berkaitan langsung dengan upaya mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan ekonomi warga akan menjadi pondasi kuat dalam proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon terus melejit karena semua sektor



Grafik 1.2 Laju Peertumbuhan Ekonomi (LPE) kabupaten Cirebon 2018-2022

perekonomian daerah bergerak bersama-sama, mulai pertanian, perikanan, UMKM, sektor barang dan jasa hingga pariwisata. Selain itu Pemerintah daerah maupun swasta turut serta menggeliatkan perekonomian daerah. Masing-masing memiliki peran penting mendorong semua sektor perekonomian. Tugas Pemerintah Daerah menjadi *trigger* bagi perkembangan daerah dan mengejawantahkan lewat kebijakan sehingga mampu memicu sektor perekonomian warga. Masyarakat dan sektor swasta di Kabupaten Cirebon memiliki peran besar dalam menggerakkan roda industri dan proses kreatif di masyarakat. Karena itu dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon selalu berada pada tren positif.

Grafik 1.3. Data Th. 2022 untuk PDRB dan LPE hasil proyeksi bappelitbangda



Dalam meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga terus mendorong program afirmasi untuk memastikan seluruh

masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pelosok desa mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Berdasarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang cukup menjanjikan, maka diperkirakan stabilitas ekonomi di Kabupaten Cirebon dalam tahun 2022 tetap terjaga dan diharapkan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menumbuhkan sektor modern seperti jasa dan manufaktur, namun tetap harus dipastikan pertumbuhan juga terjadi di sektor-sektor menengah ke bawah, sehingga ekonomi kerakyatan dapat terwujud. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah merumuskan tujuh kebijakan utama yang terdiri atas peningkatan belanja infrastruktur, meningkatkan efisiensi belanja daerah, memantapkan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik, pengurangan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah melalui pemerataan pembangunan, mendukung efektifitas, berkeberlanjutan program nasional Sistem Jaminan Sosial Nasional dan perbaikan pelayanan kesehatan.

1.4 Kondisi Pemerintahan

Perangkat Daerah dibentuk sebagai wadah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sesuai potensi daerah, beban kerja, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Dengan merujuk pada kedua peraturan di atas, susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun



Gambar 1.2

Kantor Bupati Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber

2021, Pemerintah Kabupaten Cirebon membentuk organisasi perangkat daerah dengan komposisi 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 22 Dinas, 6 Badan serta 2 Rumah Sakit Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.7
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

No.	Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat

4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7.	Badan Pendapatan Daerah
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10.	Dinas Pendidikan
11.	Dinas Kesehatan
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
14.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
15.	Dinas sosial
16.	Satuan Polisi Pamong Praja
17.	Dinas Ketenagakerjaan
18.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
19.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20.	Dinas Lingkungan Hidup
21.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23.	Dinas Perhubungan
24.	Dinas Komunikasi dan Informatika
25.	Dinas Kebudayaan Pariwisata
26.	Dinas Pertanian
27.	Dinas Pemuda dan Olahraga
28.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
29.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
30.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
32.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waled
33.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun

Selain perangkat daerah di atas, Pemerintah Kabupaten Cirebon membentuk perangkat daerah dalam bentuk kecamatan dengan jumlah 40 kecamatan dan 12 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.8
Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan
1.	Kecamatan Arjawinangun
2.	Kecamatan Astanajapura
3.	Kecamatan Babakan

4.	Kecamatan Beber
5.	Kecamatan Ciledug
6.	Kecamatan Ciwaringin
7.	Kecamatan Depok
8.	Kecamatan Dukupuntang
9.	Kecamatan Gebang
10.	Kecamatan Gegecik
11.	Kecamatan Gempol
12.	Kecamatan Greged
13.	Kecamatan Gunungjati
14.	Kecamatan Jamblang
15.	Kecamatan Kaliwedi
16.	Kecamatan Kapetakan
17.	Kecamatan Karangsembung
18.	Kecamatan Karangwareng
19.	Kecamatan Kedawung
20.	Kecamatan Klangeran
21.	Kecamatan Lemahabang
22.	Kecamatan Iosari
23.	Kecamatan Mundu
24.	Kecamatan Pabedilan
25.	Kecamatan Pabuaran
26.	Kecamatan Palimanan
27.	Kecamatan Pangenan
28.	Kecamatan Panguragan
29.	Kecamatan Pasaleman
30.	Kecamatan Plered
31.	Kecamatan Plumbon
32.	Kecamatan Sedong
33.	Kecamatan Sumber
34.	Kecamatan Suranenggala
35.	Kecamatan Susukan
36.	Kecamatan Susukanlebak
37.	Kecamatan Tengahtani
38.	Kecamatan Talun
39.	Kecamatan Waled
40.	Kecamatan Weru

Tabel 1.9
Kelurahan di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan
1.	Kelurahan Sumber
2.	Kelurahan Perbutulan
3.	Kelurahan Watubelah
4.	Kelurahan Kenanga
5.	Kelurahan Kemantren
6.	Kelurahan Tukmudal
7.	Kelurahan Sendang
8.	Kelurahan Kaliwadas
9.	Kelurahan Pasalakan
10.	Kelurahan Pejambon
11.	Kelurahan Babakan
12.	Kelurahan Gegunung

1.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.

Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon berdasarkan data Simpeg Tahun 2022 sebanyak 10.384 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.10
Jumlah Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Berdasarkan Data SIMPEG Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD/Sederajat	19
2.	SMP/Sederajat	50
3.	SMA/Sederajat	825
4.	D I	33

5.	D II	395
6.	D III	1.025
7.	D IV	326
8.	S 1	7.118
9.	S 2	586
10.	S 3	7
	JUMLAH	10.384

Sementara berdasarkan golongan dan ruang ASN, terbanyak dari golongan III dan kemudian golongan IV. Besarnya jumlah golongan III dan IV ini dikarenakan jumlah dari fungsional guru dan tenaga medis lebih besar dari



Gambar 1.3 ASN Setda Kab. Cirebon saat Apel Pagi

jumlah tenaga teknis lainnya dan pejabat dan staf struktural, berikut tabel yang menggambarkan ASN Kabupaten Cirebon dari ruang dan golongan.

Tabel 1.11
Jumlah ASN berdasarkan Ruang/Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan I/a	0
	Golongan I/b	2
	Golongan I/c	3
	Golongan I/d	32
	Total Golongan I	37
2.	Golongan II/a	82
	Golongan II/b	62
	Golongan II/c	312
	Golongan II/d	576
	Total Golongan II	1032
3.	Golongan III/a	765
	Golongan III/b	949

	Golongan III/c	1239
	Golongan III/d	2211
	Total Golongan III	5164
4.	Golongan IV/a	1607
	Golongan IV/b	2428
	Golongan IV/c	112
	Golongan IV/d	4
	Total Golongan IV	4151

Sumber: BKPSDM Kabupaten Cirebon

1.6 Isu Strategis

Beberapa permasalahan atau isu strategis yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2022, dituangkan di dalam dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Lunturnya sebagian kearifan lokal masyarakat yang selaras dengan tantangan pembangunan;
- 2) Rendahnya daya saing SDM;
- 3) Kehidupan beragama belum sepenuhnya menghadirkan keshalehan sosial;
- 4) Kemandirian ekonomi daerah belum terwujud;
- 5) Tata pemerintahan belum menghasilkan layanan dan kebijakan publik yang berorientasi pada masyarakat; dan
- 6) Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat belum optimal.

Berdasarkan uraian masalah pokok tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan kedalam permasalahan dan akar masalah yang telah dirangkum berdasarkan kondisi di Kabupaten Cirebon, Penetapan isu strategis ini sebagai bahan kajian dalam menetapkan cita-cita pembangunan sebagai solusi dari

isu strategis dengan mempertimbangan sumber daya yang tersedia. Isu strategis Kabupaten Cirebon dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Lunturnya sebagian kearifan lokal masyarakat yang selaras dengan tantangan pembangunan

Cirebon tumbuh dan berkembang menjadi kabupaten penuh dengan warisan budaya dan sejarah yang menjadi bagian kebudayaan Cirebon, sebagai bagian penting dari kehidupan bangsa Indonesia dan tercatat sebagai situs sejarah nasional. Dalam konteks lebih spesifik Kebudayaan yang melekat pada masyarakat Cirebon merupakan perpaduan berbagai budaya yang datang dan membentuk ciri khas tersendiri. Dalam kaitan dengan khasanah seni dan budaya dapat dilihat dari beberapa pertunjukan khas masyarakat Cirebon antara lain Tarling, Tari Topeng Cirebon, Wayang Kulit Cirebon, Sintren, Kesenian Gembyung, Sandiwara Cirebonan dan sebagainya; mencerminkan kearifan dan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat asli Cirebon. Tentu saja, banyaknya potensi budaya yang ada di Cirebon, bukan hanya akan mendatangkan wisatawan, melainkan bisa terbukanya lapangan pekerjaan di bidang pariwisata.

Dalam membangun, mengelola, hingga melestarikan budaya wisata di Cirebon, pihak pemerintah membutuhkan banyak orang untuk berpartisipasi dalam pembangunan maupun pelestarian. Kemudian tumbuh tempat wisata budaya dan sejarah yang juga dukungan masyarakat setempat. Inilah sisi kebudayaan Cirebon sebagai warisan sejarah.

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Cirebon terbentuk dari kondisi geografis (seperti obyek laut/bahari), sejarah (meliputi obyek wisata peninggalan-peninggalan sejarah) dan budaya yang dimiliki (meliputi keunikan masyarakat Kabupaten Cirebon dengan segala kebudayaannya).

Masalah lunturnya budaya masyarakat yang selaras dengan tantangan pembangunan dan pengembangannya bagi pariwisata, di sebabkan oleh permasalahan belum optimalnya pengembangan budaya dengan akar masalah yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta belum sinergis dan nyata dalam melestarikan dan memanfaatkan budaya asli Cirebon.

2. Rendahnya daya saing SDM

Salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon dan daerah lain pada umumnya adalah menyangkut daya saing SDM. Kabupaten Cirebon memiliki keunggulan komparatif dengan melimpahnya kekayaan alam yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah. Namun demikian, jika melihat daya saing Kabupaten Cirebon dari sisi SDM, maka masih menyisakan banyak tantangan.

Salah satu indikator yang menggambarkan daya saing SDM di Kabupaten Cirebon yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data capaian IPM Kabupaten Cirebon, diketahui bahwa IPM Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai 68,05 pada tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 68,75 pada tahun 2020. Meskipun terus mengalami

peningkatan, namun angka IPM pada tahun 2020 masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 71,94 dan IPM Provinsi Jawa Barat yang mencapai 72,09.

Indikator lainnya yaitu persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon, dimana pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sebanyak 247,94 ribu jiwa atau 11,24 persen dari total penduduk Kabupaten Cirebon. Angka ini meningkat dibanding dengan tahun 2019 dimana jumlah penduduk miskin hanya 217,64 ribu jiwa atau hanya 9,94 persen. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Cirebon guna meningkatkan daya saing SDM di Kabupaten Cirebon.

Selain IPM dan tingkat kemiskinan, indikator lainnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana TPT di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 angkanya mencapai 9,21 persen. Selanjutnya meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2017 dan 2018, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga menjadi 10,28 persen. Selanjutnya TPT Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 11,52 persen. Hal ini disebabkan dengan adanya

pandemi covid-19 yang setahun belakangan ini telah menimpa wilayah Indonesia dan salah satunya termasuk di Kabupaten Cirebon.

Selain IPM dan tingkat kemiskinan, indikator lainnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana TPT di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 angkanya mencapai 9,21 persen. Selanjutnya meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2017 dan 2018, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga menjadi 10,28 persen.

Selanjutnya TPT Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 11,52 persen. Hal ini disebabkan dengan adanya pandemi covid-19 yang setahun belakangan ini telah menimpa wilayah Indonesia dan salah satunya termasuk di Kabupaten Cirebon. Lebih lanjut dan berdasarkan hasil rangkuman pada gambaran umum kondisi daerah, maka dapat dirangkum beberapa permasalahan yang mengakibatkan rendahnya daya saing SDM, diantaranya:

- a. Layanan pendidikan belum berkualitas dan terakses hingga ke pelosok, dengan akar masalah yaitu:
 - 1) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan;
 - 2) Kualitas tenaga pendidik dan pendidikan belum sepenuhnya terqualifikasi baik;
 - 3) Sistem pelaporan dan manajemen pendidikan masih rendah.

- b. Kualitas layanan kesehatan belum merata, khususnya bagi masyarakat tidak mampu, dengan akar masalah yaitu:
- 1) Minimnya ketersediaan tenaga medis dan distribusi yang tidak merata; dan
 - 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit.
- c. Penanganan kemiskinan dan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada umumnya belum optimal, dengan akar masalah:
- 1) Belum optimalnya penanganan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
 - 2) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan belum optimal.
- d. Belum efektifnya optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal, dengan akar masalah yaitu:
- 1) Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan dan kompetensi/keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar;
 - 2) Masih lemahnya kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan industrial.

3. Kehidupan beragama belum sepenuhnya menghadirkan keshalehan sosial

Pembangunan bidang agama merupakan upaya untuk mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan

kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan bidang agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

Namun demikian, di Kabupaten Cirebon masih terdapat permasalahan yang dapat memicu kehidupan beragama belum sepenuhnya menghadirkan keshalehan sosial, diantaranya:

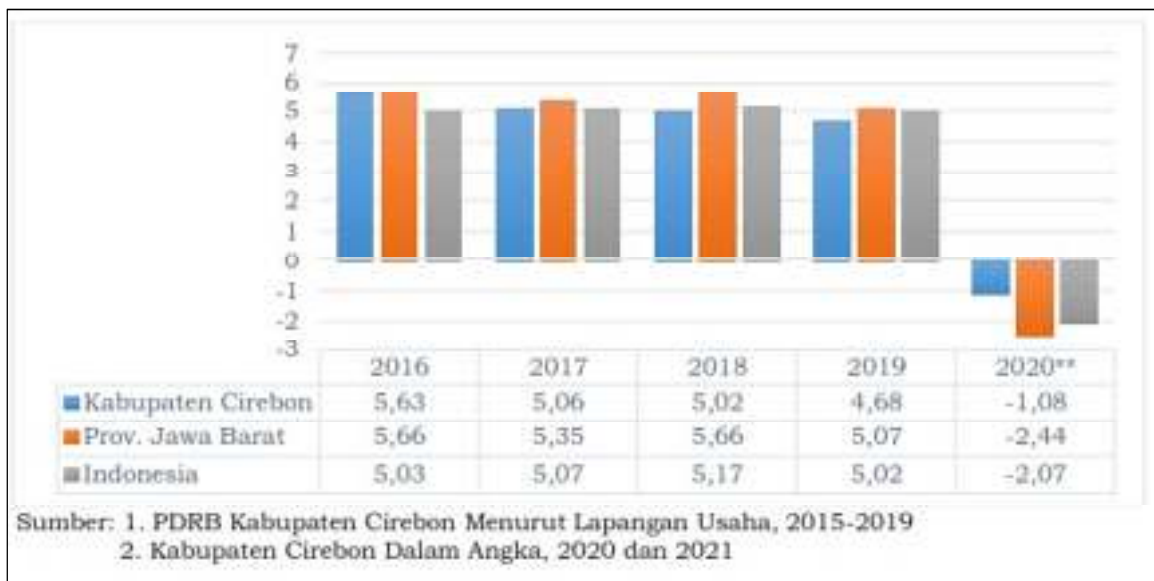
Penyelenggaraan pelayanan dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum optimal, dengan beberapa akar masalah yaitu: 1). Belum optimalnya penataan toleransi kehidupan beragama masyarakat; 2). Kegiatan dan personil linmas masih terbatas; 3). Upaya penegakan Perda belum optimal.

4. Kemandirian ekonomi daerah belum terwujud

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon menurun dari tahun 2016 sampai 2019 hingga mencapai angka 4,68 persen pada tahun 2019, dimana pada tahun 2020 sampai minus diangka -1,08 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini berdampak cukup signifikan bagi gejolak perekonomian Kabupaten Cirebon sehingga perlu melakukan penanganan khusus terhadap fenomena pertumbuhan ekonomi

menurun ini. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, maka LPE Kabupaten Cirebon padakurun waktu tahun 2017-2019 selalu berada di bawah LPE Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Hal tersebut sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat dan kabupaten Cirebon



Selain kondisi tersebut di atas dan sesuai analisis permasalahan lebih teknis di perangkat daerah, berikut adalah akar permasalahan di beberapa permasalahan terkait, antara lain:

- a. Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian, dengan akar masalah antara lain:
 1. Belum optimalnya hilirisasi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah;
 2. Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan daerah;

3. Masih rendahnya pengembangan kemitraan pengelolaan dan penanganan pemasaran hasil komoditi pertanian;
 4. Produksi ikan mengalami penurunan; dan
 5. Kurangnya pemahaman terhadap teknologi perikanan.
- b. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum dikembangkan secara optimal dalam menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing, dengan akar masalah antara lain:
1. Belum efektifnya pemanfaatan potensi unggulan daerah Kabupaten Cirebon;
 2. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal;
 3. Pengembangan destinasi unggulan daerah belum terarah, termasuk dukungan akses dan infrastruktur multi pihak dalam pengembangan destinasi wisata; dan
 4. Kerjasama dan promosi wisata masih kurang.
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan peningkatan produktivitas tanaman pangan utama, dengan akar masalah:
1. Menurunnya produktivitas tanaman per satuan luas, tantangan dan kebutuhan akan alih fungsi lahan;
 2. Distribusi pangan ke masyarakat belum merata; dan
 3. Ketergantungan masyarakat pada jenis pangan beras dan kurangnya diversifikasi pangan terutama pangan non beras.
- d. Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, dengan akar masalah yaitu:

1. Masih banyak pelaksanaan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 2. Belum optimalnya peningkatan kemantapan jalan;
 3. Masih tingginya kawasan kumuh dengan rumah tidak layak huni (RTLH);
 4. Cakupan pelayanan air yang belum optimal.
- e. Belum optimalnya upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan akar masalah yaitu:
1. Tingginya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 2. Pengelolaan kawasan hutan belum optimal

5. Tata pemerintahan belum menghasilkan layanan dan kebijakan publik yang berorientasi pada masyarakat

Penataan birokrasi terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon guna mewujudkan *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Namun, beberapa upaya masih harus dipacu efektivitas dan efisiensinya dalam mewujudkan *good governance*.

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dapat diketahui dengan melihat beberapa ciri dan karakteristiknya.

Di tataran praktis, upaya perbaikan tatakelola pemerintahan yang baik selama ini diarahkan pada:

- a. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi;
- b. Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas;
- c. Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi;
- d. Keseimbangan kekuatan (*balance of force*), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama; dan
- e. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

Tantangan ke depan birokrasi Kabupaten Cirebon adalah bagaimana perubahan-perubahan lingkungan eksternal, tuntutan masyarakat dan stakeholder pembangunan, termasuk aspirasi generasi milenial dapat dipenuhi dalam berbagai layanan. Kebutuhan atas pemanfaatan TIK di masyarakat harus diadaptasi sepadan dalam layanan publik dan dalam administrasi pemerintahan guna meningkatkan kinerja birokrasi, akuntabilitas, dan perbaikan

kebijakan pembangunan di berbagai bidang termasuk kebijakan pengembangan wilayah.

Beberapa permasalahan yang membutuhkan penanganan serius, di antaranya:

a. Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah, dengan akar masalah antara lain:

1. Pengelolaan penyelenggaraan dan manajemen pemerintahan dalam mendukung pelayanan publik belum maksimal; dan
2. Belum optimalnya tingkat pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja keuangan daerah, dengan akar masalah yaitu:

1. Pelayanan prima yang sesuai dengan SPM belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh aparatur pemerintahan;
2. Keselarasan/konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan tupoksi perangkat daerah belum berjalan dengan baik;
3. Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Cirebon;
4. Belum optimalnya kinerja, peran, kapasitas, dan kapabilitas APIP/P2UPD.

c. Tata kelola pemerintahan belum memanfaatkan TIK secara optimal guna mendukung pelayanan publik, dengan akar masalah antara lain:

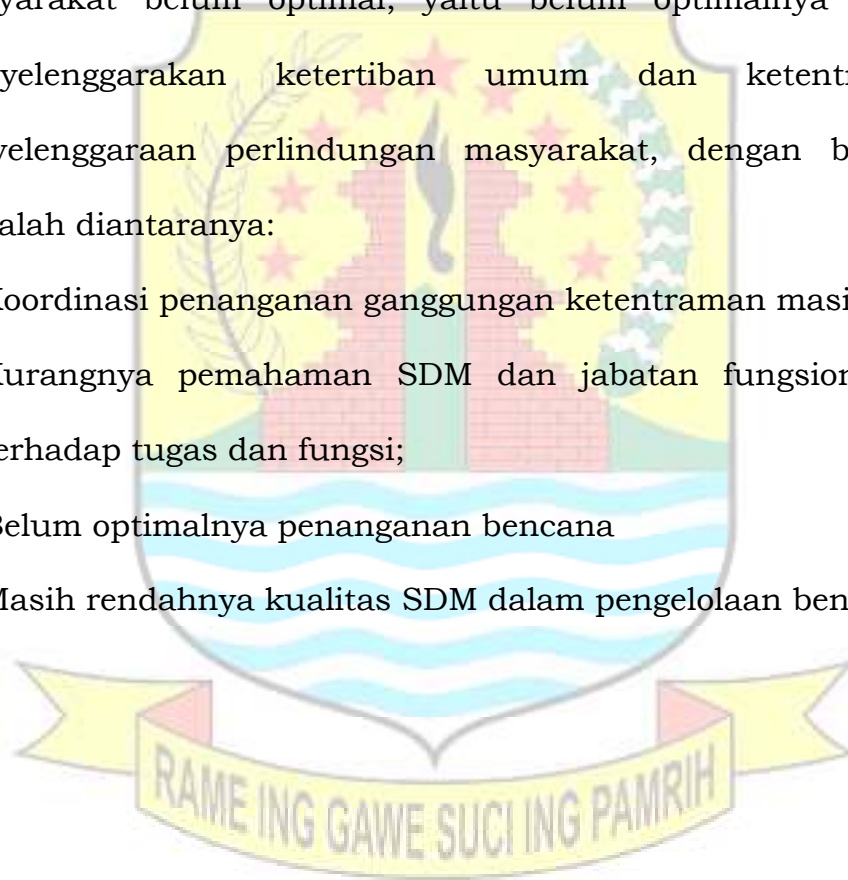
1. Belum optimalnya sistem pelayanan dan administrasi pemerintahan; dan
 2. Minimnya inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi untuk manajemen pemerintahan.
- d. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa belum optimal, dengan akar masalah yaitu:
1. Pembangunan desa belum diselenggarakan secara efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa;
 2. Pengembangan kawasan perdesaan belum optimal; dan
 3. Pengembangan BUMDes belum optimal untuk mendukung prioritas daerah.
- e. Lemahnya koordinasi dan pelaksanaan pembangunan kewilayahan di tingkat kecamatan, dengan akar masalah yaitu:
1. Rendahnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan maupun desa; dan
 2. Lemahnya koordinasi antar-sektor (perangkat daerah) dalam pengembangan kawasan perdesaan.
- f. Kurangnya pengembangan peran dan kreativitas dalam pembangunan dan olahraga, dengan akar masalah yaitu:
1. Rendahnya partisipasi pemuda dalam lapangan dan kesempatan kerja; dan
 2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga.

6. Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat belum optimal

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Namun demikian, di Kabupaten Cirebon masih terdapat permasalahan yang dapat memicu Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat belum optimal, yaitu belum optimalnya upaya untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, dengan beberapa akar masalah diantaranya:

- a. Koordinasi penanganan gangguan ketentraman masih rendah;
- b. Kurangnya pemahaman SDM dan jabatan fungsional Satpol PP terhadap tugas dan fungsi;
- c. Belum optimalnya penanganan bencana
- d. Masih rendahnya kualitas SDM dalam pengelolaan bencana.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat di implementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1 Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Cirebon dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, Kabupaten Cirebon menetapkan visi dan misi sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN.”

Penjelasan dari Visi sebagai berikut :

1) Berbudaya

Berbudaya mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut.

2) Sejahtera

Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial.

3) Agamis

Agamis dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif.

4) Maju

Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan daya saing yang tinggi baik di tataran regional maupun nasional bahkan internasional, didukung dengan sikap disiplin dan etos kerja serta daya kreasi dan inovasi yang tinggi dari masyarakat dan aparatur pemerintahan sehingga akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan pemerataan ekonomi bagi masyarakatnya.

5) Aman

Aman dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melanjutkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut kepala daerah menyusun 5 (lima) misi dengan rumusan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
- 3) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.

- 4) Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
- 5) Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Penjabaran misi dalam tujuan pembangunan daerah termasuk indikator dan target disajikan dalam tabel 2.1, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penjabaran Misi dalam Tujuan Pembangunan Daerah
Beserta Indikator dan Target

Misi	Tujuan	Indikator	Rumus	Satuan	Target		
					2020	2021	2022
Misi 1 Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi dan Adat Istiadat	Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon	Persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan	Jumlah jenis obyek budaya daerah yang lestari pada tahun berjalan/total jumlah obyek budaya yang ada x 100%	Kelompok	264	264	258
Misi 2 Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan dan Ekonomi	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I1 \times I2 \times I3}$ I1= kesehatan (harapan hidup) I2= pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) I3= pendapatan (pengeluaran pendapatan riil)	Poin	68,75	69,53	70,42
	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan	Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan / total jumlah penduduk X 100%	Persen	11,24	11,14	11,04
		Tingkat Penangguran	Jumlah angkatan kerja	Persen	11,52	11,12	10,70

		Terbuka (TPT)	yang tidak bekerja/jumlah angkatan kerja X 100%				
		PDRB per Kapita	PDRB/Jumlah Penduduk	Juta	22,43	23,25	24,95
Misi 3 Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, dan Beretika	Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Penghitungan terhadap indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama dalam suatu lingkungan sosial masyarakat	Poin	78,00	81	84,00
Misi 4 Meningkatnya Produktifitas Masyarakat Untuk Lebih Maju dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(PDRB pada tahun berkenaan – PDRB tahun sebelumnya)/ PDRB tahun sebelumnya X 100%	Persen	-1,08	4,38	4,61
		Indeks Gini	Angka absolut 1 Dikurangi dengan jumlah total Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas tertentu dikalikan dengan Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai dengan kelas yang dimaksud	Poin	0,34	0,34	0,33
		Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	-	Ribu Rupiah/ Kapita /Tahun	10.342	10.606	10.891
	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa	Indeks Reformasi Birokrasi	Permen PAN RB No. 11 Tahun 2011 tentang kriteria dan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi	Indeks	55	60	65,00

Misi	Tujuan	Indikator	Rumus	Satuan	Target		
					2020	2021	2022
Misi 5 Memeilihara Keamanan dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusivitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Indeks ketertiban dan ketentraman lingkungan	Laporan pelanggaran PERDA yang ditangani/seluruh laporan pelanggaran PERDA	Persen	53,05	56,09	64,12

Mengacu pada dokumen Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Cirebon Tahun 2022, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon dan Perubahannya Tahun 2022, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 yang ditandatangani Bupati Cirebon. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon	Jumlah Kelompok / Komunitas Kebudayaan yang aktif	258 kelompok
2.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7.18 Tahun
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.44 Tahun
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	72.24 Tahun
4.	Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon	1.9 Persen
5.	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	Rasio kesempatan kerja	58.03 Persen
6.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	Persentase Penyelesaian Friksi/Gesekan Antar Umat Beragama	81 Persen
7.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.08 persen

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	3.74 Persen
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.25 Persen
		Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.63 persen
8.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	71.98 poin
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93.2 persen
9.	Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)	80.2 poin
10.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)	52.76 poin
11.	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks kemandirian fiskal daerah	17.36 Poin
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	3.35 poin
12.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih	Nilai SAKIP	76 poin
		Opini BPK terhadap LKPD	1 WTP
		Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	75 poin
13.	Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	3.08 poin
14.	Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah desa mandiri	49 desa
15.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Jumlah pelanggaran PERDA	393 Kasus
16.	Menurunnya resiko bencana	Indeks resiko bencana	149.36 Poin

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cirebon ditetapkan melalui Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 050/Kep.595 –Bappelitbangda/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022. Adapun IKU Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana berikut :

Table 2.3
Target Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif	Kelompok	258
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.18
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.44
4	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72.24
5	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon	Persen	1.90
6	Rasio Kesempatan Kerja	Persen	58.03
7	Persentase penyelesaian friksi/gesekan antar umat beragama	Persen	81
8	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2.08
9	Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	Persen	3.74
10	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	5.25
11	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	4.63
12	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Poin	71.98
13	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Persen	93.20
14	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)	Poin	80.20
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Poin	52.76
16	Indeks kemandirian fiskal daerah	Poin	17.36

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
17	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	3.35
18	Nilai SAKIP	Poin	76
19	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	1
20	Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	Poin	75
21	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Poin	3.08
22	Jumlah desa mandiri	Desa	49
23	Jumlah pelanggaran PERDA	Kasus	393
24	Indeks resiko bencana	poin	149,36



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan di perjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Cirebon selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No.	Rentang capaian	Kategori capaian
1.	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)/Sangat Baik (SB)
2.	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3.	55 % s.d. 75 %	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2022 berdasarkan pada tingkat pencapaian indikator sasaran dan menggambarkan tingkat capaian pada program/kegiatan. Perhitungan persentase pencapaian

rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Secara umum Pemerintah Kabupaten Cirebon telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024.

Mengacu pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- ❖ Misi I terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja;
- ❖ Misi II terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 5 indikator kinerja;
- ❖ Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja;
- ❖ Misi IV terdapat 2 tujuan, 8 sasaran dan 15 indikator kinerja;
- ❖ Misi V terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja.

Table. 3.1.1
Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja Utama	Pencapaian indikator Sasaran
1.	Misi I	1	1	1	BS=0, B=1, C=0, K=0
2.	Misi II	2	4	5	BS=4, B=1, C=0, K=0
3.	Misi III	1	1	1	BS=0, B=1, C=0, K=0
4.	Misi IV	2	8	15	BS=10, B=3, C=0, K=2
5.	Misi V	1	2	2	BS=1, B=1, C=0, K=0
	Jumlah	7	16	24	BS=1, B=1, C=0, K=0

Dari 16 (enam belas) sasaran dengan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah :

Table 3.1.2
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
Misi I (1 indikator sasaran)			
1.	Baik Sekali	0	0,00
2.	Baik	1	100,00
3.	Cukup	0	0,00
4.	Kurang	0	0,00
	Jumlah	1	100,00
Misi II (5 indikator sasaran)			
1.	Baik Sekali	4	80,00
2.	Baik	1	20,00
3.	Cukup	0	0,00
4.	Kurang	0	0,00
	Jumlah	5	100,00
Misi III (1 indikator sasaran)			
1.	Baik Sekali	0	0,00
2.	Baik	1	100,00
3.	Cukup	0	0,00
4.	Kurang	0	0,00

	Jumlah	1	100
Misi IV (15 indikator sasaran)			
1.	Baik Sekali	10	66,67
2.	Baik	3	20,00
3.	Cukup	2	0,00
4.	Kurang	0	13,33
	Jumlah	15	100
Misi V (2 indikator sasaran)			
1.	Baik Sekali	1	50,00
2.	Baik	1	50,00
3.	Cukup	0	0,00
4.	Kurang	0	0,00
	Jumlah	2	100

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 16 (enam belas) Sasaran Strategis dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 15 indikator sasaran atau 62,50% bermakna Baik Sekali, 7 indikator sasaran atau 29,17% bermakna Baik, dan 2 indikator sasaran atau 8.33% bermakna Kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 109,34%, Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 bermakna Sangat Baik.

3.2 Analisis Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Analisis Kinerja Sasaran: “Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon”. Data capaian kinerja sasaran 1 disajikan dalam tabel berikut:

Table 3.2.1
 Realisasi Capaian Indikator Sasaran
 Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian (%)	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif	Kelompok	257	267	103.89	258	258	100
Rata-rata capaian kinerja				103,89			100

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon” dengan indikator jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif dengan target 258 kelompok terealisasi sebesar 258, sehingga pencapaiannya sebesar 100% dan termasuk predikat “Berhasil”.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.2 Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif	Kelompok	264	267	258



Tari Topeng Kelana Cirebon Gaya Slangit

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.2.3 Program dan Anggaran sasaran “Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon”

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	3,462,313,000.00	3,383,497,884.00	97,72
2.	Program pengembangan kesenian tradisional	167.850..000,00	167.850.000,00	100
	Total	3.630.163.000,00	3.551.347.884,00	97,83

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2022

Realisasi dana yang di gunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 3.551.347.884,00 dari anggaran sebesar 3.630.163.000,00 atau 97,83%. Realisasi keuangan sebesar 97,83 dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tercapainya sasaran tersebut diantaranya:

- 1) Pembinaan pelestarian dan potensi warisan budaya, termasuk pemberian penghargaan dan pendaftaran cagar budaya. Hal yang dilakukan antara lain sebagai berikut:
 - a) Pemberian apresiasi terhadap seniman-seniman dan budayawan yang ada di Kabupaten Cirebon.
 - b) Registrasi nasional cagar budaya
- 2) Peningkatan kualitas budaya masyarakat melalui pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya yang ada di Kabupaten Cirebon, melalui :
 - a) Pembinaan desa berbudaya;

- b) Penanaman nilai-nilai budaya dengan melakukan kegiatan gelar macapat tingkat Kabupaten Cirebon;
- c) Pembinaan Pranatacara
- d) Pentas wayang kulit, dengan diadakannya pentas dalang Cirebon



)*Kabupaten Cirebon Masuk 5 Dalang Penyaji Terbaik Festival Dalang Wayang Kulit Jabar

- e) Pengembangan seni melalui pentas seni.



Para penari dari Sanggar Seni Manunggaling Dharmasastra

- 3) Peran serta masyarakat dalam pelestarian warisan budaya antara lain penyelenggaraan upacara adat seperti: tradisi nadran, syawalan Gunungjati, ganti walit, rajaban, ganti sirap, muludan.
- 4) Sosialisasi nilai budaya melalui seni pertunjukan.
- 5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pentas seni dan budaya melalui pengadaan sarana dan prasarana lembaga budaya Kabupaten Cirebon.
- 6) Penyelenggaraan festival dan misi kesenian.



)*Salah satu kesenian yang ditampilkan dalam Gegesik Kreatif Festival 2022

2. Analisis Kinerja Sasaran: “Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat” yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja mencapai 100,89%, dan termasuk predikat “sangat berhasil” Data capaian kinerja sasaran sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.4
Realisasi Capaian Indikator Sasaran
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

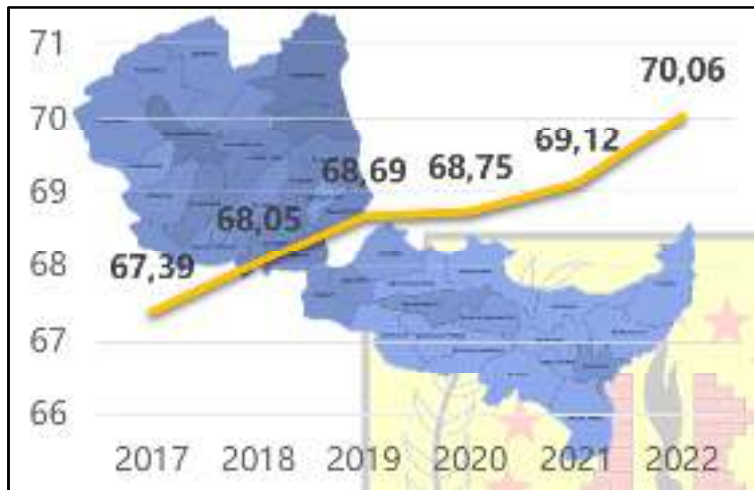
Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian (%)	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,05	7,10	100,70	7,18	7,40	103,06
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,34	12,27	99,43	12,44	12,28	98,71
Rata-rata capaian kinerja				100,06			100,89

Dari tabel diatas diketahui bahwa 2 indikator sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, 1 indikator melebihi target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100,89% di kategorikan Sangat Baik. Secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 100,06% dan realisasi terpenuhi hal ini lebih baik dari capaian kinerja tahun 2021.

Rata-Rata Lama (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini mempunyai kegunaan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Cirebon tahun 2022 mencapai 7.40 tahun lebih tinggi capaian tahun 2021, yaitu sebesar 7.10 tahun. Pencapaian RLS Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya, ini berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan masyarakat Kabupaten Cirebon dalam mengenyam pendidikan formal. ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam melanjutkan sekolah sudah termasuk ke dalam kategori meningkat terutama pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) ke jenjang pendidikan menengah dan perguruan

tinggi. Selain itu, angka Harapan Lama Sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Cirebon masih sangat rendah pada tahun 2022 baru mencapai 12,28 Tahun.

Grafik 3.1 Indeks Pembangunan manusia Kab. Cirebon 2017-2022



Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah ini menunjukkan peluang anak

usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 sebesar 12,28 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,28 tahun atau setara dengan Diploma I.

Kewenangan pengelolaan pendidikan menengah lebih besar berada di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Cirebon (SMA/SMK). Peran yang dapat diambil Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah dengan mempertahankan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran sampai dengan lulus SMP/ sederajat, serta meningkatkan proses pembelajaran pada pendidikan kesetaraan Paket A/B/C, guna mengakomodir warga Kabupaten Cirebon yang putus sekolah.

Sasaran “meningkatnya derajat pendidikan masyarakat” dicapai melalui program berikut:

Tabel 3.2.5 Program dan Anggaran Sasaran “Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat”

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	377.650.579.400	366.385.145.592	97,02
2.	Program Pengembangan Kurikulum	232.055.600	232.055.600	100
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	416.684.700	397.951.442	95,50
4.	Program penunjang urusan pemerintah daerah Kab/Kota	985.315.827.711	985.315.827.711	95,65
	Total	1.363.615.147.411	1.352.330.980.345	99,17

Sumber: Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Cirebon

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 1.352.330.980.345 dari anggaran sebesar Rp 1.363.615.147.411 atau 99,17%. Realisasi keuangan sebesar 99,17% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,89%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat adalah:

- 1) Penyediaan sekolah oleh pemerintah dan pihak swasta dengan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan maksimal. Jumlah sekolah di Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:
 - a. TK/RA berjumlah 328, terdiri dari 16 sekolah negeri dan 312 sekolah swasta.
 - b. SD/MI berjumlah 881, terdiri dari 815 sekolah negeri dan 66 sekolah swasta. Persentase jumlah sekolah negeri lebih sedikit dari pada sekolah swasta yaitu sebesar 92,51%.

c. SMP/MTs berjumlah 211, terdiri dari 80 sekolah negeri dan 131 sekolah swasta. Persentase jumlah sekolah swasta lebih banyak dari pada sekolah negeri yaitu sebesar 62,09%, sedangkan sekolah negeri dengan presentase sebesar 37,91%. Jika dilihat dari persentase jumlah peserta didik, sejatinta peserta didik di sekolah negeri lebih banyak dari pada sekolah swasta

d. SMA/MA berjumlah 162 terdiri dari 30 sekolah negeri dan 132 sekolah swasta. Persentase jumlah sekolah swasta lebih banyak dari pada sekolah negeri yaitu sebesar 81,50%, sedangkan sekolah negeri dengan presentase sebesar 18,5%.

2) Penyediaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari APBN maupun APBD Kabupaten Cirebon untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA. Pada tahun 2022, dengan tujuan meringankan beban orang tua peserta didik, terutama bagi keluarga ekonomi tidak mampu, dana BOS Reguler APBN SD dialokasikan per siswa sebesar Rp.900.000/tahun, sedangkan BOS APBD Kabupaten Cirebon untuk SD Negeri sebesar Rp.405.000,00 dan SD Swasta/MI per siswa sebesar Rp.360.000,00/tahun. Adapun BOS Reguler APBN SMP sebesar per siswa Rp.1.100.000,00/tahun, dan BOS APBD Kabupaten Cirebon untuk SMP Negeri sebesar Rp.555.000,00 dan SMP Swasta per siswa sebesar Rp 405.000,00/tahun. Adapun BOS Reguler APBN SMA sebesar per siswa Rp.1.500.000,00/tahun, dan BOS APBD Kabupaten Cirebon untuk SMA Negeri sebesar Rp.660.000,00 dan SMA Swasta per siswa sebesar Rp 450.000,00/tahun.

3) Penyediaan bantuan pendidikan bagi siswa yang keluarga miskin atau tidak mampu dari jenjang tingkat SD dan SMP. Untuk tingkat jenjang SD diberikan bantuan setiap siswa Rp.450.000/Tahun total penerima sebanyak 106.740 siswa atau terealisasi sebesar Rp. 42.712.425.000,00 sedangkan bagi peserta didik jenjang SMP diberikan bantuan setiap siswa Rp.750.000,00/tahun dengan total penerima sebanyak 47.333 siswa dengan total bantuan sebesar Rp. 29.016.000.000,00. Pemanfaatan IT dalam penyampaian materi pembelajaran kepada anak didik SD, pembelajaran dengan metode penyajian materi yang menarik, animatif dan guru model yang kreatif, diharapkan dapat lebih merangsang minat belajar dan mudah memahami materi yang disampaikan, khususnya pada masa pandemi COVID-19 saat ini.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.6 Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,92	7,10	7,40
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,57	12,27	12,28

3. Analisis kinerja sasaran: “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja “Umur Harapan Hidup” mencapai 100,32% dan termasuk predikat “Sangat Baik”. Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.7
Realisasi Capaian Indikator Sasaran
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian (%)	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,11	72,18	100,09	72,24	72,47	100,32
Rata-rata capaian kinerja				100.09			100,32

Capaian peningkatan angka harapan hidup dapat menggambarkan keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya, yang dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup.

Realisasi indikator sasaran terhadap target RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.8 Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD

No.	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,99	72,18	72,47

Sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” dicapai melalui program berikut:

Tabel 3.2.9 Program dan anggaran sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	562.851.400,00	558.468.110,00	99,22
2.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	330.836.557.993,00	303.679.540.400,00	91,79

3.	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	79.999.900,00	79.999.900,00	100
4.	Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan	199.999.300,00	199.205.010,00	99,60
	Total	331.679.408.593,00	304.517.213.420,00	91,81

Sumber: Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Cirebon

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.304.517.213.420,00 dari anggaran sebesar Rp.331.679.408.593,00 atau 91,81%. Realisasi keuangan sebesar 91,81% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,32%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat antara lain:

1. Pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
2. Peran serta masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih sehat dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.
4. Adanya kesadaran masyarakat umum dan institusi untuk melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) secara mandiri.
5. Adanya inovasi-inovasi dalam peningkatan pelayanan kesehatan pada puskesmas sebagai ujung pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
6. Tersedianya puskesmas rawat inap yang mampu menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial Dasar (PONED). Dan

7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Kesehatan Reproduksi, Gerakan Masyarakat Cerdas memilih Obat (Gema Cermat), Gerakan Rumah Tangga Tidak Merokok, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta sosialisasi hidup sehat dengan olahraga.

4. Analisis kinerja sasaran: “Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial” yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja mencapai 105,79%, dan termasuk predikat “Sangat Baik” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.10
Realisasi Capaian Indikator Sasaran

Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian (%)	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon	%	1,70	1,50	88,23	1,90	2,01	105,79
Rata-rata capaian kinerja				88,23			105,79

Realisasi indikator sasaran terhadap target RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.11 Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD

No.	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon	Tahun	-	88,23	105,79

Sasaran “Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial” dicapai melalui program berikut:

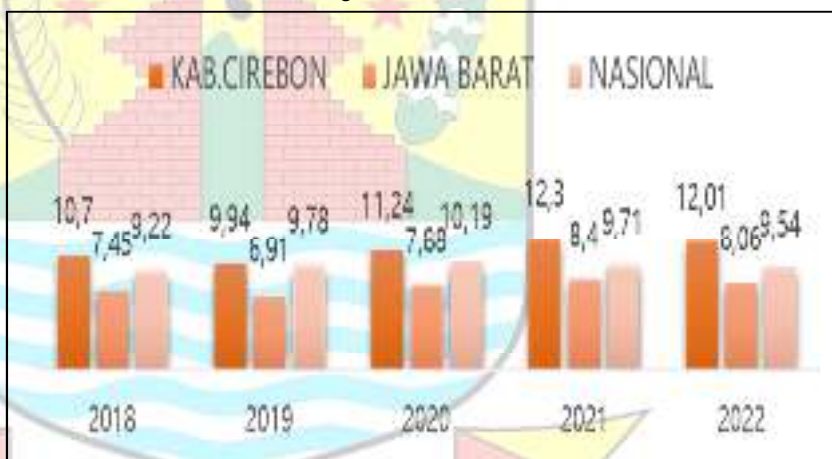
Tabel 3.2.12 Program dan Anggaran Sasaran “Menurunnya Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengalami Disfungsi Sosial”

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program pemberdayaan sosial	1.516.926.100,00	1.478.305.700,00	97,45
2.	Program rehabilitasi sosial	1.796.748.975,00	1.685.441.100,00	93,81
3.	Progrm perlindungan dan jaminan sosial	13.824.520.500	12.137.653.470,00	87,80
	Total	17.138.195.575,00	15.301.400.270,00	89,28

Sumber: Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Cirebon

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.15.301.400.270,00 dari anggaran sebesar Rp.17.138.195.575,00 atau 89,28%. Realisasi keuangan sebesar 89,28% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 105,79%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Grafik 3.2 Tingkat Kemiskinan tahun 2022



Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, maka dapat diukur dengan indikator nilai SKM

baik. Pada tahun 2022 nilai SKM yang dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon adalah 83,21 masuk dalam kategori BAIK. Hal ini dicapai dengan memberikan kuisisioner kepada masyarakat terkait pelayanan pembuatan pengantar KIS (Kartu Indonesia Sehat). Nilai ini dihitung dengan rumus :

$$\text{Total nilai persepsi per unsur} / \text{Total unsur yang terisi} \times \text{Nilai penimbang atau nilai indeks} \times \text{nilai dasar.}$$

Indikator kedua adalah persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani dapat dihitung dengan rumus :

(Jumlah PPKS yang tertangani/Total PPKS di Kabupaten Cirebon) X 100%.

Pada tahun 2022 realisasi persentase jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani adalah sebesar 105,79% (dari total jumlah PMKS/PPKS yang tertangani sebesar 4.329 orang dari jumlah total jumlah PMKS/PPKS 215.751 orang) sedangkan target yang ditetapkan adalah 1.90% sehingga capaian indikator kinerja pada tahun 2022 yaitu sebesar 105,79% (Sangat Baik).

5. Analisis kinerja sasaran: “Meningkatnya daya saing angkatan kerja”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kesempatan Kerja” dengan 1 (satu) indikator kinerja “Rasio Kesempatan Kerja” mencapai 96,06 % dan termasuk predikat “Sangat Baik”. Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.13
Realisasi Capaian Indikator Sasaran
Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian (%)	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Rasio Kesempatan Kerja	%	57,22	57,22	100	58,03	63,79	109,93
Rata-rata capaian kinerja				100			109,93

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran meningkatnya daya saing angkatan kerja, 1 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100% dikategorikan Baik. Nilai realisasi capaian diperoleh dari: $\frac{\text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan kerja}} \times 100\%$

Realisasi indikator sasaran terhadap target RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.14 Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD

No.	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Rasio Kesempatan Kerja	Tahun	-	57,22	63,79

Sasaran “Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja” dicapai melalui program berikut:

Tabel 3.2.15 Program dan Anggaran Sasaran “Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja”

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	10,109,095,077.00	9,064,607,712.00	89,67
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	5,871,712,400.00	5,813,222,953.00	99,00
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	1,583,718,375.00	1,517,459,454.00	95,82
4.	Program Hubungan Industrial	401,002,950.00	392,301,370.00	97,83
	Total	17.965.528.802,00	16.787.591.489,00	93,44

Sumber: Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Cirebon

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.16.787.591.489,00 dari anggaran sebesar Rp.17.965.528.802,00 atau 93,44%. Realisasi keuangan sebesar 93,44% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 109,93%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah penganggur meningkat tajam. Jumlah penganggur tahun 2021 sebesar 10,38% menurun menjadi sebesar 8,11% pada tahun 2022. Penurunan jumlah penganggur dipengaruhi oleh:

- 1) Adanya kesempatan kerja yang tersedia;
- 2) Usia tenaga kerja dan jumlah angkatan kerja yang tersedia;
- 3) Besarnya permintaan total masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan pelatihan kerja;
- 5) Pelaksanaan padat karya;

- 6) Penempatan mandiri melalui lulusan pelatihan BLK;
- 7) Informasi lowongan kerja;

6. Analisis kinerja sasaran: “Meningkatnya Penyelesaian Pergesekan (Friksi) Antar dan Internal Umat Beragama”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya penyelesaian pergesekan (Friksi) antar dan internal umat beragama” dengan 1 (satu) indikator kinerja “Persentase penyelesaian Friksi/gesekan antar umat beragama” mencapai 100% dan termasuk predikat “Sangat Baik”. Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.16
Realisasi Capaian Indikator Sasaran
Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian (%)	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase penyelesaian friksi/gesekan antar umat beragama	%	80	89,57	111,96	81	81	100
Rata-rata capaian kinerja				111,96			100

Jumlah konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) pada tahun 2022 tercatat dari target 81 dengan capaian realisasi 100%, artinya tidak ada konflik SARA yang terjadi di Kabupaten Cirebon pada tahun ini. Kondisi ini sama seperti tahun 2021, tidak terdapat konflik SARA di wilayah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan pemantauan selama tahun 2020, situasi berlangsung aman dan kondusif.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.17 Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD

No.	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Persentase penyelesaian friksi/gesekan antar umat beragama	Tahun	80,77	111,96	100

Sasaran Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.2.18 Program dan Anggaran Sasaran “Meningkatnya Penyelesaian Pergesekan (friksi) Antar dan Internal Umat Beragama”

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.552.545.300,00	3.251.751525,00	91,53
2.	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	529.720.200,00	527.818.000,00	99,64
3.	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	353.941.300,00	337.942.600,00	95,48
4.	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	1.516.427.600,00	1.454.141.800,00	95,89
5.	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	3.944.537.300,00	3.906.972.727,00	99,05
	Total	9.897.171.700,00	9.478.626.652,00	95,77

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.9.478.626.652,00 dari anggaran sebesar Rp.9.897.171.700,00 atau 95,77%. Realisasi keuangan sebesar 95,77% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah:

1. Pembinaan pelatihan intelijen, Terbinanya eksnapiter dan keluarganya yang mendapatkan program deradikalisasi.
2. Pembentukan Tim FKDM Kabupaten Cirebon.
3. Koordinasi dan pembahasan bidang Ipoleksosbudhankam oleh Forkopimda.
4. Sinergitas yang baik antara pimpinan daerah, pejabat instansi terkait, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan

serta respon yang tepat dalam menyelesaikan potensi konflik SARA.



Pengukuhan

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon, meminta kepada pengurus FKUB yang baru dikukuhkan untuk tetap menjadi rumah bersama bagi umat beragama. Komunikasi dan juga kerja sama yang baik di bidang keagamaan dapat turut serta membantu pembangunan daerah.

7. Analisis kinerja sasaran: “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan” dengan 4 (empat) indikator kinerja mencapai 91,47% dan termasuk predikat “Baik”. Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.19
Realisasi Capaian Indikator Sasaran
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian (%)	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		1,86	8,78	472,04	2,08	4,00	192,31
Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	3,08	3,20	103,89	3,74	4,69	125,40
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5	3,30	66,00	5,25	2,30	43,81
Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	4,33	6,86	158,42	4,63	7,67	165,66
Rata-rata capaian kinerja				200,08			131,80

Capaian sektor perdagangan besar eceran dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun 2022 lebih rendah dibanding tahun 2021 yang sempat mengalami kontraksi sedalam 3,78%. Capaian tersebut juga lebih tinggi dibanding sebelum terjadi pandemi Covid-19 yang tumbuh 6,88% pada 2020.

Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.2.20 Program dan Anggaran Sasaran “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan”

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1,176,457,350.00	1,136,470,300.00	96,60
2.	program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	8,728,726,850.00	8,124,054,690.00	93,07
3.	program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	190,734,200.00	172,119,780.00	90,24
4.	program perizinan usaha pertanian	83,268,800.00	83,102,120.00	99,80
5.	program penyuluhan pertanian	1,470,193,600.00	1,464,193,600.00	99,59
6.	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	4,966,538,100.00	4,872,516,280.00	98,11
7.	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	211,805,300.00	199,066,339.00	93,99
8.	Program pengembangan ekspor	113,931,800.00	107,996,610.00	94,79

9.	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	393,696,900.00	393,010,700.00	99,83
10.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	151,724,300.00	142,483,249.00	93,91
11.	Program perencanaan dan pembangunan industri	1,538,208,800.00	1,520,989,664.00	98,88
12.	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	119,698,000.00	119,590,222.00	99,91
13.	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1,468,015,300.00	675,090,480.00	45,99
14.	Program pemasaran pariwisata	275,016,000.00	274,155,600.00	99,69
15.	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	142,859,250.00	141,900,162.00	99,39
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	477,770,000.00	449,958,117.00	94,18
	Total	21.508.644.550,00	19.876.697.913,00	92,41

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.19.876.697.913,00 dari anggaran sebesar Rp. 21.508.644.550,00 atau 92,41%. Realisasi keuangan sebesar 92,41% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 91,47%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.21 Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD

No.	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	0,59	8,78	2,98
2.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	1,56	3,20	4,73
3.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	4,74	3,30	2,61
4.	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,49	6,86	2,15

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan” adalah:

- Melakukan perhitungan yang matang sebelum melakukan kegiatan usaha industri olahan sehingga dapat memperkecil kerugian;
- Memanfaatkan festival untuk menjaring dan memperkenalkan hasil produknya kepada para konsumen.

8. Analisis kinerja sasaran: “Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat”

Pencapaian indikator kinerja sasaran “meningkatkan ketahanan pangan masyarakat” dengan 2 indikator sasaran sepenuhnya melampaui dari target kinerja yang ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 102,67% dikategorikan “Sangat Baik”. Secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 100,11% dan realisasi terpenuhi hal ini lebih baik dari capaian kinerja tahun 2020.

Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.22
Realisasi Capaian Indikator Sasaran
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian (%)	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Skor PPH Ketersediaan	Poin	71.71	71.73	100.02	71,98	74,59	103,63
Skor PPH Konsumsi	Poin	93.10	93.30	100.21	93,20	96,20	103,22
Rata-rata capaian kinerja				100,11			103,43

Pola Pangan Harapan (PPH) didefinisikan sebagai komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya (FAO-RAPA,1989). Susunan beragam pangan didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 (sembilan) kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan

pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH disusun dengan tujuan untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutrition balance*) berdasarkan cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestibility*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*).

PPH Ketersediaan dihitung menggunakan data ketersediaan energi 11 kelompok bahan makanan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dikelompokkan kembali menjadi 9 kelompok dalam perhitungan PPH Ketersediaan pada setiap tahunnya. PPH yang dihasilkan akan memberikan gambaran kualitas keragaman makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat. Dibandingkan dengan skor pada tahun sebelumnya, skor PPH Ketersediaan tahun 2022 mengalami peningkatan.

Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.2.23 Program dan Anggaran Sasaran “Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program penanganan kerawanan pangan	160,013,500.00	153,189,100.00	95,74
2.	Program pengawasan keamanan pangan	181,011,800.00	180,101,800.00	99,50
	Total	341.025.300,00	333.290.900,00	97,73

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.333.290.900,00 dari anggaran sebesar Rp. 341.025.300,00 atau 97,73%. Realisasi keuangan sebesar 97,73% dibandingkan dengan

capaian kinerja sasaran sebesar 102,67%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.24 Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD

No.	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Program penanganan kerawanan pangan	Poin	69,90	71.73	74,59
2.	Program pengawasan keamanan pangan	poin	91,60	93.30	94,80

Dari hasil evaluasi kinerja berbagai kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, ditemui beberapa penyebab keberhasilan dan kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022:

- a. Peningkatan Produksi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras
- b. Penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan.

9. Analisis kinerja sasaran: “Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah” dengan 1(satu) indikator kinerja yaitu “Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)” mencapai 107,89% termasuk predikat “Sangat Baik”. Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.25
Realisasi Capaian Indikator Sasaran
Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian (%)	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)	%	79.46	79.43	99.96	80,20	86,57	107,94
Rata-rata capaian kinerja				99,96			107,94

Prasarana dan sarana infrastruktur di Kabupaten Cirebon belum seluruhnya dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan oleh beban penggunaan prasarana infrastruktur yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan penggunaan sarana lalu lintas serta ketidakseimbangan antara penyediaan prasarana sarana publik sesuai rencana tata ruang terhadap desakan pemanfaatan ruang. Kondisi jalan salah satunya dipengaruhi oleh total beban kendaraan yang melewati, sehingga pengawasan terhadap beban maksimal kendaraan perlu dilaksanakan secara berkala untuk menjaga kualitas jalan serta pengurangan hambatan samping yang terjadi pada ruas jalan.

Kondisi infrastruktur ini disertai dengan belum optimalnya layanan transportasi umum yang disebabkan minimnya minat pengguna dan terbatasnya sarana dan prasarana. Dalam kaitannya dengan perekonomian masyarakat, prasarana perekonomian juga masih perlu ditingkatkan kualitas dan jangkauan pelayanannya. Permasalahan infrastruktur dapat diatasi dengan meningkatkan proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi baik, pemenuhan sarana prasarana dasar masyarakat, penerapan pengelolaan jaringan irigasi, partisipasi di masyarakat dan peningkatan sarana prasarana perekonomian untuk mengembangkan ekonomi lokal.

Persentase penyediaan layanan infrastruktur wilayah mencapai target dikarenakan :

- Mengoptimalkan potensi yang ada untuk infrastruktur jalan yang pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan penajaman data skala prioritas penanganan jalan dan melakukan peningkatan dan pemeliharaan periodik jalan secara berkesinambungan;

- Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- Mengoptimalkan UPT yang merupakan kepanjangan tangan dinas untuk mengatasi luas wilayah dan banyaknya jalan yang tersebar di Kabupaten Cirebon;
- Memanfaatkan teknologi konstruksi yang ada seperti penggunaan teknologi betonisasi (*rigid pavement*) pada ruas-ruas jalan tertentu.

Sasaran Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.2.26 Program dan Anggaran Sasaran “Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah”

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	16.099.927.438,00	15.632.441.280,00	97,10
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	128.272.361.922,00	123.382.088.759,00	96,19
	Total	144.372.289.360,00	139.014.530.039,00	96,29

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.139.014.530.039,00 dari anggaran sebesar Rp.144.372.289.360,00 atau 96,29%. Realisasi keuangan sebesar 96,29% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 107,89%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.27 Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD

No.	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)	%	169,27	79,43	86,53

faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten Cirebon maupun dana APBN.
- b. Pembangunan Longstorage DAM Pintu Air Cangkring blok sikacang- Kec. Gegesik, Pembangunan/peningkatan sungai ciwaringin, Pemasangan bronjong kali pembuang Tanjunganom anak sungai Cijangkelok blok Getrak Kec. Pasaleman, Normalisasi sungai ciberas desa cibogo-Pabuaran, rehabilitasi tumpangsari pada saluran pembuang sigabus-kecamatan kaliwedi, peningkatan bendungan duan jaran Tukbual - Kecamatan Depok, Normalisasi saluran irigasi tersier B.MTR Kecamatan Ciledug.



Pembangunan Longstorage DAM Pintu Air Cangkring blok sikacang- Kec. Gegesik



Pembangunan/peningkatan sungai ciwaringin



Pemasangan bronjong kali pembuang Tanjunganom anak sungai Cijangkelok blok Getrak Kec. Pasaleman



Normalisasi sungai ciberas desa cibogo-Pabuaran



Rehabilitasi tumpangsari pada saluran pembuang sigabus-kecamatan kaliwedi



peningkatan bendungan duan jaran Tukbual – Kecamatan Depok



Normalisasi saluran irigasi tersier B.MTR Kecamatan Ciledug.

- c. Peningkatan kondisi jaringan jalan kabupaten dengan mengukur realisasi prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (Baik dan Sedang) sebesar 844,12% dari target 85% dengan capaian 98,96% belum mencapai target sebesar 0,88% penanganan jalan pada tahun 2022 belum optimal hal ini tingkat kebutuhan penanganan jalan yang belum sebanding dengan alokasi yang ada.



Peningkatan jalan PPI Gebang



Pemeliharaan Periodik Jalan Plumbon-Kenanga



Peningkatan jembatan dan ruas jalan megugede – kecabaian

- d. Peningkatan kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang dengan indikator sasaran ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).



- e. Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal dengan indikator sasaran persentase layanan informasi jasa konstruksi.

Pelatihan Tenaga Terampil



Bimbingan Teknis



- f. Peningkatan kualitas penyediaan sistem air minum, persampahan, air limbah dan bangunan gedung.



Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR).



Pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) / Pembangunan Broncaptering/ Pembangunan Sumur Dalam terlindungi.



Pembangunan TPA dan Pembangunan Jalan Menuju TPA.

10. Analisis kinerja sasaran: “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan 1(satu) indikator kinerja mencapai 108,21 % dan termasuk predikat “Sangat Baik”. Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.28

Realisasi Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian (%)	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	52,67	54,39	103,26	52,76	57,09	108,21
Rata-rata capaian kinerja				103,26			108,21

IKLH merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup yang menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah dibidang pengelolaan

lingkungan hidup. Penghitungan IKLH berasal dari penggabungan 3 indikator komponen lingkungan, yaitu indeks kualitas air (IKA) yang diukur menggunakan 7 (tujuh Indeks Kualitas Lahan) parameter yaitu TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli dan total coliform. Parameter indeks kualitas udara (IKU), yaitu SO₂ dan NO₂. Sedangkan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) diukur berdasarkan luas tutupan lahan. Pengukuran indeks tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.2.29 Realisasi IKLH Kabupaten Cirebon

No.	Indeks	Satuan	Tahun 2022			
			Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai		49,02	48,52	98,98
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai		76,72	81,03	94,68
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Nilai		33,85	27,56	81,41
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			51,26	57,09	Sedang

Perhitungan IKLH dilakukan sejak tahun 2009, hingga saat ini telah mengalami beberapa kali penyesuaian. Perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan. Rumus yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah sebagai berikut:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cirebon	$(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$
---	--

Klasifikasi Kategori Nilai IKLH 2020-2024 :

Indeks	Nilai 2022	Kriteria	Target 2022	Kriteria
IKA	48,52	KURANG	49,02	KURANG
IKU	81,03	BAIK	76,72	BAIK
IKL	27,56	KURANG	33,85	KURANG
IKLH	57,09	SEDANG	51,26	SEDANG

IKLH diformulasikan dari perhitungan IKA sebesar 48,52 IKU sebesar 81,03 dan IKL sebesar 27,56. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh IKLH Kabupaten Cirebon sebesar 57,09 yang di kategorikan Sedang.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 3.2.30 Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD

No.	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	53,38	54,39	57,09

Perbandingan nilai IKLH ini dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 3.3 hasil pengukuran IKLH 2020 - 2022 kabupaten Cirebon

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.2.31 Program dan Anggaran Sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	137.575.875,00	127.244.316,00	92,49
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	367.116.300,00	296.609.528,00	80,79
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	258.547.150,00	213.863.796,00	82,72
4.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	123.332.400,00	122.952.628,00	99,69
5.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	84.499.800,00	57.099.800,00	67,57
6.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	367.116.300,00	296.609.528,00	80,79
7.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	3.531.216.100,00	2.748.699.638,00	77,84

8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	92.667.275,00	92.340.503,00	99,65
	Total	4.962.071.200,00	3.955.419.737,00	79,71

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 3.955.419.737,00 dari anggaran sebesar Rp. 4.962.071.200,00 atau 79,71%. Realisasi keuangan sebesar 79,71% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 107,89%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah (IPAL);
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
- d. Penanganan persampahan dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA/;
- e. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah;
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut;



g. Pengendalian emisi gas rumah kaca mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

h. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan melaksanakan pembangunan taman/RTH di wilayah Kabupaten Cirebon;



i. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten Cirebon.

11. Analisis kinerja sasaran: “Meningkatnya Kapasitas Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik”

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kapasitas Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik” dengan 2 (dua) indikator kinerja Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 mencapai 102,60% dan termasuk predikat “Sangat Baik”. Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.32
Realisasi Capaian Indikator Sasaran
Meningkatnya Kapasitas Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian (%)	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Poin	16,79	17,23	102,62	17,36	20,08	115,66
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	3,65	3,30	90,41	3,35	3,34	99,70
Rata-rata capaian kinerja				96,51			107,68

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari survei kepuasan masyarakat pada 73 unit organisasi, terdiri dari 6 Badan, 25 Dinas,

2 Sekretariat, dan 40 Kecamatan. Capaian IKM Kabupaten Cirebon tahun 2022 lebih baik dibandingkan IKM tahun 2021 yang terealisasi sebesar 99,40 atau meningkat 0,03%.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 per satuan organisasi dan pemeringkatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.33 Peringkat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022

No.	Perangkat Daerah	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	IKM 2022
1	Sekretariat Daerah	B	Baik	3,49
2	Sekretariat DPRD	C	Cukup	2,96
3	Inspektorat	B	Baik	3,48
4	Dinas Pendidikan	B	Baik	3,29
5	Dinas Kesehatan	B	Baik	3,34
6	RSUD Waled	B	Baik	3,32
7	RSUD Arjawinangun	B	Baik	3,24
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	B	Baik	3,27
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	B	Baik	3,44
10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	B	Baik	3,29
11	Dinas Ketenagakerjaan	B	Baik	3,18
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B	Baik	3,16
13	Dinas Lingkungan Hidup	B	Baik	3,13
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	Baik	3,52
15	Dinas Perhubungan	B	Baik	3,34
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	B	Baik	3,24
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	B	Baik	3,07
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	A	Sangat Baik	3,59
19	Dinas Pertanian	B	Baik	3,28
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	B	Baik	3,08
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	C		3,32
22	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	A	Sangat Baik	3,49
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	B	Baik	3,06
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A	Sangat Baik	3,53
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A	Sangat Baik	3,27
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A	Sangat Baik	3,57
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	B	Baik	3,79
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	B	Baik	3,61
29	Badan Pendapatan Daerah	B	Baik	3,41
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B	Baik	3,23
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	Baik	3,52
32	Kecamatan Arjawinangun	B	Baik	3,10

No.	Perangkat Daerah	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	IKM 2022
33	Kecamatan Astanajapura	B	Baik	3,27
34	Kecamatan Babakan	C	Cukup	3,06
35	Kecamatan Beber	B	Baik	3,46
36	Kecamatan Ciledug	B	Baik	3,12
37	Kecamatan Ciwaringin			
38	Kecamatan Depok			
39	Kecamatan Dukupuntang			
40	Kecamatan Gebang	B	Baik	3,49
41	Kecamatan Gegecik	B	Baik	3,49
42	Kecamatan Gempol	A	Sangat Baik	3,57
43	Kecamatan Greged	B	Baik	3,20
44	Kecamatan Gunungjati	B	Baik	3,43
45	Kecamatan Jamblang	B	Baik	3,32
46	Kecamatan Kaliwedi	B	Baik	3,46
47	Kecamatan Kapetakan	B	Baik	3,16
48	Kecamatan Karangsembung	B	Baik	3,24
49	Kecamatan Karangwareng	B	Baik	3,32
50	Kecamatan Kedawung	B	Baik	3,46
51	Kecamatan Klangeran	B	Baik	3,15
52	Kecamatan Lemahabang	B	Baik	3,30
53	Kecamatan Losari			
54	Kecamatan Mundu	B	Baik	3,33
55	Kecamatan Pabedilan	B	Baik	3,37
56	Kecamatan Pabuaran	B	Baik	3,20
57	Kecamatan Palimanan	C	Cukup	3,05
58	Kecamatan Pangenan	B	Baik	3,24
59	Kecamatan Panguragan	B	Baik	3,27
60	Kecamatan Pasaleman	B	Baik	3,12
61	Kecamatan Plered	B	Baik	3,42
62	Kecamatan Plumbon	B	Baik	3,38
63	Kecamatan Sedong	A	Sangat Baik	3,65
64	Kecamatan Sumber	B	Baik	3,24
65	Kecamatan Suranenggala	B	Baik	3,23
66	Kecamatan Susukan	B	Baik	3,39
67	Kecamatan Susukanlebak	B	Baik	3,17
68	Kecamatan Talun	B	Baik	3,11
69	Kecamatan Tengahtani	B	Baik	3,3
70	Kecamatan Waled	A	Sangat Baik	3,79
71	Kecamatan Weru	B	Baik	3,48
72	Kecamatan Plered	B	Baik	3,33
73	Kecamatan Plumbon	B	Baik	3,37

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cirebon Tahun 2022

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.34 Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Poin	30,50	17,23	20,08
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	3,26	3,30	3,33

(IKM)				
-------	--	--	--	--

Ketercapaian sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik dicapai melalui program berikut:

Tabel 3.2.35 Program dan Anggaran sasaran “Meningkatnya Kapasitas Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik”

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4,550,600,627.00	4,334,053,720.00	95.24
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5,276,144,970.00	5,080,856,825.00	96.30
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,741,103,314.00	2,574,271,927.00	93,91
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49,863,025,872.00	47,378,295,248.00	95,02
	Total	62.430.874.783,00	59.367.477.720,00	95,09

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.59.367.477.720,00 dari anggaran sebesar Rp.62.430.874.783,00 atau 95,09%. Realisasi keuangan sebesar 95,09% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 107,53%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Berkaitan dengan kondisi diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN Kabupaten Cirebon, sehingga nilai IKM yang dicapai masih belum mencapai target yang ditetapkan;
- b. Beberapa perangkat daerah masih belum mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga beberapa jenis pelayanan masih belum memenuhi prasyarat minimal yang harus dicapai;

- c. Budaya masyarakat yang guyub dan gotong royong seringkali tidak sesuai dengan budaya profesional ASN, masyarakat seringkali mengungkapkan cara terima kasih yang kadang belum sesuai dengan kode etik ASN.

Terkait dengan permasalahan diatas, berikut adalah solusi yang akan dilakukan yaitu :

- a. Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan publik pada masyarakat melalui program dan kegiatan yang langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Penyusunan SPM dan SOP bagi setiap perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon baik yang memiliki fungsi pelayanan mikro dan makro, langsung dan tidak langsung kepada masyarakat.

- c. Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai garda terdepan pelayanan publik.



Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP)

- d. Peningkatan Sarana prasarana pelayanan publik baik kualitas maupun kelengkapannya, melalui langkah pembangunan dan pemeliharaan.

Realisasi Persentase Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 adalah sebesar 20,08%, dihitung dari:

$$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\% = \frac{795.263.789.810,52}{3.960.950.348.873,52} \times 100\% = \mathbf{20,08}$$

Sumber PAD Kabupaten Cirebon terdiri dari: a) pajak daerah dengan realisasi sebesar Rp.308.442.409.838,00 (38,78%), b) retribusi daerah sebesar Rp.27.897.867.887,00 (3,51%), c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.13.702.211.968,00 (1,72%), dan d) Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.445.221.300.117,52 (55,98%).

Sumber pendapatan daerah meliputi PAD sebesar Rp.795.263.789.810,52 (20,08%), Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan sebesar Rp.2.207.880.314.541,00 (55,74%), dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.97.535.470.050,00 (2,46%).

12. Analisis kinerja sasaran: “Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik dan Bersih”

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik dan Bersih” dengan 3 (tiga) indikator kinerja Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 103,91% dan termasuk predikat “Sangat Baik”. Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 3.2.36
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik dan Bersih

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian (%)	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Nilai SAKIP	Poin	73	66,65	91,30	76,00	67,71	89,09

Opini BPK terhadap LKPD	Hasil opini	WTP	WTP	100	1,00	1,00	100
Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	Poin	70	73	104.28	75,00	92,00	122,66
Rata-rata capaian kinerja				98,52			103,91

1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), mencapai target dikarenakan :

a. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan.

b. Pelaporan keuangan telah berbasis Akrual (Accrual Basis) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang.

c. Pelaporan

Untuk yang ke- 7 kalinya, Kab. Cirebon meraih Predikat WTP, 5 Mei 2022

keuangan telah berbasis Akrual

(*Accrual Basis*)

yaitu

akuntansi

yang



memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi

- d. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
2. Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/978/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022. Hasil Nilai/Predikat SAKIP Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 mencapai 67,71 dengan predikat “BAIK”, mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2021 dengan nilai 66,45.



Kabupaten Cirebon akan terus berusaha agar nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) mencapai target dalam RPJMD dengan cara :

- a. Tetap menjaga komitmen dalam implementasi SAKIP;
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja serta melakukan inovasi-inovasi, baik inovasi percepatan pelayanan publik maupun inovasi peningkatan kinerja pegawai;
- c. Menyempurnakan integrasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja yang dikembangkan secara mandiri;
- d. Menerapkan e-kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan kepada PNS (TPP) atau TPP berbasis kinerja sampai ke level individu, besar kecilnya TPP berdasarkan capaian kinerja masing-masing PNS baik kinerja proses maupun kinerja output/outcome sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dengan e-kinerja, setiap atasan langsung dapat memantau/memonitor serta menilai setiap aktivitas/kegiatan dan capaian kinerja bawahannya, sehingga akan diketahui “Siapa melakukan apa” sesuai jabatan dan ukuran kinerja masing-masing pegawai. Jadi setiap pegawai mempunyai ukuran kinerja yang jelas dan terukur;
- e. Terus menerus melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah khususnya Kecamatan tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga

diharapkan Kecamatan secara bertahap lebih paham terhadap SAKIP dan manfaat dari implementasi SAKIP.

- f. Tetap menjaga sinergitas birokrasi dan meminimalisasi ego sektoral yaitu bekerja secara tim bukan Superman tetapi Supertim;

3. Nilai MCP Progres

keberhasilan

Pemerintah

Kabupaten Cirebon

diperoleh dari :

1) Indikator

Perencanaan dan



Penganggaran APBD mencapai 99%, 2) Pengelolaan Barang dan Jasa mencapai 90%, 3) Perizinan mencapai 93%, 4) Pengawasan APJP mencapai 90%, 5) Manajemen ASN sebesar 88%, 6) Optimalisasi Pajak daerah mencapai 81%, 7) Pengelolaan BMD mencapai 93%, dan 8) Tata Kelola Keuangan Desa dengan nilai 99%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.37 Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Nilai SAKIP	Poin	66,65	67.45	67,71
2.	Opini BPK terhadap LKPD	Hasil opini	WTP	WTP	1,00
3.	Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	Poin	72,15	73	92,00

Ketercapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik dan Bersih dicapai melalui program berikut:

Tabel 3.2.38 Program dan Anggaran sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintah yang Baik dan Bersih”

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.	49,863,025,872.00	47,378,295,248.00	95,02
2.	Program pengelolaan keuangan daerah	5,276,144,970.00	5,080,856,825.00	96,30
3.	Program pengelolaan barang milik daerah	2,741,103,314.00	2,574,271,927.00	93,91
4.	Program penyelenggaraan pengawasan	4,117,485,000.00	4,090,728,687.00	99,35
5.	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	1,244,001,200.00	1,021,962,338.00	82,15
	Total	63.241.760.356,00	60.146.115.025,00	95,11

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 60.146.115.025,00 dari anggaran sebesar Rp. 63.241.760.356,00 atau 95,09%. Realisasi keuangan sebesar 95,11% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 103,91%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

13. Analisis kinerja sasaran: “Meningkatnya Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik”

Hasil dari pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pemerintahan Berbasis Elektronik” dengan 1 (satu) Indikator Sasaran melebihi target yang ditetapkan mencapai 111,36% dan termasuk predikat “Sangat Baik”. Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.39
Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian (%)	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	point	2.93	1.91	65.18	3,08	3,43	111,36
Rata-rata capaian kinerja				65,18			111,36

Pada Tahun 2022, capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Cirebon termasuk dalam predikat Sangat Baik dengan capaian 3,43 poin dari target yang ditetapkan 3,08 point, dan mengalami peningkatan. Sebagai tindaklanjut dari rekomendasi Kementerian PAN-RB untuk mewujudkan kinerja ASN yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam hal pelayanan publik berbasis elektronik. Selain itu, Kabupaten Cirebon telah masuk dalam 100 Kabupaten/Kota Smart City yang digagas oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia sehingga menunjukkan keberhasilan Kabupaten Cirebon dalam mengintegrasikan Teknologi Informasi dalam segala aspek pelayanan. Kunci pokok untuk menjadikan suatu daerah menerapkan elektronisasi dalam penyelenggaraan pemerintah adalah keharusan dalam pasang niat untuk sungguh-sungguh dan berkomitmen kuat sejak awal, agar program tidak akan berhenti di tengah jalan sehingga kedepannya pemerintah daerah tidak hanya berorientasi terhadap kepuasan masyarakat tetapi mewujudkan kebahagiaan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.

Komitmen penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang tercantum dalam misi Kabupaten Cirebon Maju meliputi :

- peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat melalui pengembangan sistem informasi dan media sosial pemerintah kabupaten.
- Melakukan integrasi seluruh sistem yang sudah dibangun oleh perangkat daerah melalui pembangunan government service bus, sesuai dengan arahan KPK.
- Pembangunan command center sebagai pusat kendali pemerintah. Pembangunan aplikasi yang dapat memudahkan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah. Penerapan Desa Digital.

Secara prinsip dengan adanya implementasi kebijakan internal tata kelola dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Kabupaten Cirebon. Adapun dari hasil evaluasi terhadap Kabupaten Cirebon sudah menggambarkan predikat Baik dalam penerapan SPBE sebagaimana terdapat keunggulan dan kelemahan.

Kabupaten Cirebon dapat memprioritaskan pemenuhan atas aspek kebijakan internal tata kelola SPBE yang dapat diwujudkan dalam suatu kebijakan pengaturan tata kelola SPBE secara menyeluruh yang didalamnya terdapat 10 indikator yang dipersyaratkan.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.40 Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,89	1,91	3,43

Sasaran tersebut dicapai melalui program Aplikasi Informatika dengan Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.4.362.712.801,00 dari anggaran sebesar Rp.4.369.786.724,00 atau 99,84%. Selanjutnya realisasi keuangan sebesar 99,84% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 111,36%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

14. Analisis kinerja sasaran: “Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa”

Hasil dari pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa” dengan 1 (satu) Indikator Sasaran melebihi target yang ditetapkan mencapai 161,22% dan termasuk predikat “Sangat Baik”. Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.41
Realisasi Capaian Indikator Sasaran
Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian (%)	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Jumlah desa mandiri	Desa	28	42	150	49	79	161,22
Rata-rata capaian kinerja				150			161,22

Capaian indikator jumlah desa mandiri, dengan nilai unsur pembentuknya sebagai berikut :

- Indeks ketahanan lingkungan 0.75 %, Indeks ketahanan ekonomi 0.74 %, dan Indeks ketahanan sosial 0.79 %.

- Selain itu desa telah melakukan program LPPDes yaitu laporan penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dilaporkan oleh Kepala Desa dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Sebanyak 189 desa telah melakukan e-Village Budgetting artinya semua desa telah menggunakan penganggaran berbasis elektronik, mulai perencanaan sampai pencairan anggaran serta pelaporannya.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.42 Realisasi Indikator Sasaran terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Jumlah Desa Mandiri	Desa	7	42	79

Sasaran Persentase jumlah desa mandiri dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.2.43 Program dan Anggaran sasaran Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Penataan Desa	157,336,400.00	137,338,400.00	87,29
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6,524,980,756.00	6,353,789,774.00	97,38
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	922,163,000.00	910,763,000.00	98,76
4.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	587,065,550.00	572,317,150.00	97,49
	Total	8.191.545.706,00	7.974.208.324,00	97,35

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 7.974.208.324,00 dari anggaran sebesar Rp. 8.191.545.706,00 atau 97,35%. Selanjutnya realisasi keuangan sebesar 97,35% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 161,22%,

maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Bupati Cirebon menyerahkan piagam penghargaan Desa Mandiri Kab. Cirebon

15. Analisis kinerja sasaran: “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban” dengan indikator jumlah pelanggaran perda mencapai 98,72% dan termasuk predikat “Baik”. Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.44
Realisasi Capaian Indikator Sasaran
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian (%)	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Jumlah pelanggaran Perda	Kasus	398	383	96.23	393	388	101,27
Rata-rata capaian kinerja				96.23			101,27

Untuk menjaga rasa aman tetap terpelihara dengan baik, pemerintah Kabupaten Cirebon telah berkominten dengan masyarakat untuk menjaganya yaitu dengan dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUP). Peran FKUB adalah menjaga kerukunan umat beragama di Cirebon, selain itu lewat kebijakan pemerintah Sinergitas Tiga Pilar. Sinergitas Tiga Pilar adalah sebuah kegiatan rutin yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan

Cirebon. Dalam forum ini semua lintas agama, tokoh, aparat pemerintah, dan keamanan duduk bersama bagaimana mewujudkan Kabupaten Cirebon yang aman dan damai. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi pembangunan tahun 2019-2024, untuk pencapaian tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan yaitu : 1) Meningkatkan Penanganan Pelanggaran Perda / Perkada 2) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Linmas.

Sasaran Persentase meningkatnya ketentraman dan ketertiban dicapai melalui program peningkatan ketentraman dan ketertiban.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 11.723.323.923 dari anggaran sebesar Rp. 11.863.508.300 atau 98.82 %. Selanjutnya realisasi keuangan sebesar 99,84% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98,72%, maka terjadi ketidakefisiensian penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.45 Realisasi Indikator Sasaran terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Jumlah pelanggaran Perda	Kasus	-	383	388

16. Analisis kinerja sasaran: “Menurunnya Resiko Bencana”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Menurunnya Resiko Bencana” dengan 1 (satu) indikator kinerja rata-rata mencapai 95,70% dan termasuk predikat “sangat baik”. Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.46
Realisasi capaian indikator sasaran
Menurunnya Resiko Bencana

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian (%)	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Indeks Resiko Bencana	Poin	154,72	147,51	95,33	149,36	155,80	95,69
Rata-rata capaian kinerja				95,33			95,69

Kawasan dengan potensi rawan bencana yakni berada wilayah timur, tengah dan barat Kabupaten Cirebon, namun, dari dari tiga wilayah tersebut bencana kerap terjadi di tujuh kecamatan. Pelaksanaan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) belum maksimal. Destana adalah sebuah konsep membangun komunitas sadar bencana yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengurangi/mengantisipasi pasi resiko dampak bencana.



Dengan konsep ini telah mengurangi resiko bencana dan menggantikan posisi dari menanggulangi ke aruratan bencana. Dari 7 kecamatan yang merupakan kawasan rawan bencana (beresiko tinggi), pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membangun 19 Desa Tangguh Bencana (Destana). Kendala yang masih dihadapi BPBD Kabupaten Cirebon saat ini adalah jumlah personel dan tenaga teknis lapangan yang masih jauh cakupannya jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Cirebon yang mencapai 40 kecamatan.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.47 Realisasi Indikator Sasaran terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Indeks Resiko Bencana	Poin	168,42	147,51	155,80

Sasaran Persentase jumlah indeks resiko bencana dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.2.48 Program dan Anggaran sasaran Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program penanggulangan bencana	3,246,638,300.00	3,149,070,000.00	96,99
	Total	3,246,638,300.00	3,149,070,000.00	96,99

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.3,149,070,000.00 dari anggaran sebesar Rp.3,246,638,300.00 atau 96,99%. Selanjutnya realisasi keuangan sebesar 96,99% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar

95,70%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut adalah :

1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota.
2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana.
3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
4. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
5. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
6. Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat bencana.

3.3 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.372.944.564.159,00. Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 diarahkan kepada :

1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional;

2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan dari sisi belanja;
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut diatas, maka kebijakan umum keuangan/anggaran diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

- a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat / swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
- b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;
- c. Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

3.3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat dukungan dari masyarakat.

Arah pengelolaan pendapatan daerah, yaitu :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber - sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ke ketiga;
- b. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada Kas Umum Daerah;
- c. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
- d. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang pendapatan atau organisasi penghasil.

Upaya - upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Cirebon lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber - sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022
Per 31 Desember 2022

Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
A. Pendapatan Daerah			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	754.196.718.866,00	795.263.789.810,52	105,45
Hasil pajak daerah	27.852.8660.262,00	308.442.409.838,00	110,74
Hasil retribusi daerah	23.353.204.505,00	27.897.867.887,00	119,46
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	963.352.300,00	13702211968,00	142,23
Lain-lain PAD yang sah	442.681.331.099,00	445.221.300.117,52	100,57
B. Pendapatan Transfer			
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	2.289.910.093.268,00	2.207.880.314.541,00	96,42
Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	487.271.768.000,00	498.685.290.000,00	102,34
Pendapatan transfer pemerintah provinsi	363.683.730.326,00	361.585.484.472,00	99,42
C. Lain-lain pendapatan yang sah			
Bantuan keuangan dari Provinsi	99675843380,00	97535470050,00	97,85
Jumlah Pendapatan Daerah	3.994.738.153.840,00	3.960.950.348.873,52	99,15

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon

3.3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan efisien, efektif dan proporsional. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran fungsinya masing - masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program - program strategis daerah. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer yang masing – masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.2
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Per 31 Desember 2022

Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
Belanja Daerah :			
a. Belanja Tidak Langsung			
Belanja pegawai	1.636.167.836.541,00	1.561.612.475.084,00	95,44
Belanja hibah	86.498.821.700,00	83.174.048.251,00	96,18
Belanja bantuan sosial	25.256.262.500,00	24.855.923.000,00	98,41
Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	29.119.950.849,00	24.700.989.476,00	84,82
Belanja bantuan keuangan	644.600.595.00,00	644.260.169.000,00	99,95
Belanja tidak terduga	134.826.841.924,00	20.656.013.104,00	15,32
b. Belanja Langsung			
Belanja pegawai	1.636.167.836.541,00	1.561.612.475.084,00	95,44
Belanja barang dan jasa	1.453.334.913.650,00	1.315.507.381.917,00	90,52

Belanja modal	357.862.834.994,00	314.155.622.794,00	87,79
Surplus / (defisit)	372.929.902319,00	27.972.273.752,48	7,50

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon

3.3.3 Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

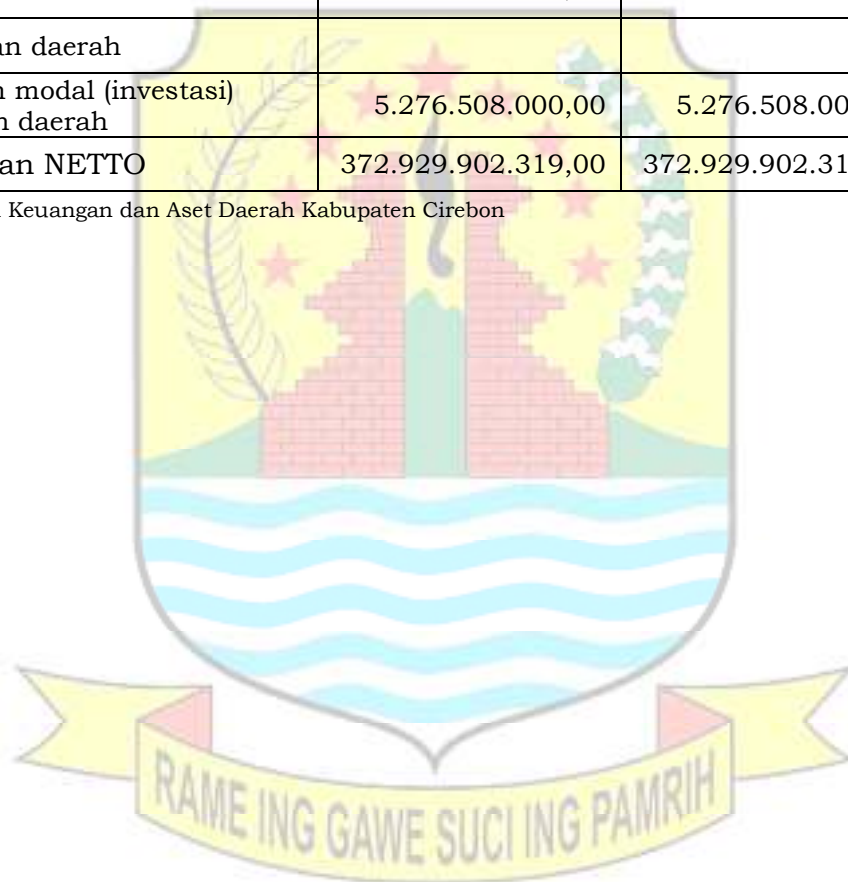
1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro / Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;
3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan aparatur dan pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.3
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022
Per 31 Desember 2022

Uraian		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
PEMBIAYAAN				
a.	Penerimaan Daerah			
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	378.206.410.319,00	378.206.410.319,00	100,00
	Penerimaan pinjaman daerah	0.00	0.00	-
	Jumlah Penerimaan Daerah	378.206.410.319,00	378.206.410.319,00	100,00
b.	Pengeluaran daerah			
	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	5.276.508.000,00	5.276.508.000,00	100,00
	Pembiayaan NETTO	372.929.902.319,00	372.929.902.319,00	100,00

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon



BAB 4 PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Kabupaten Cirebon Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Cirebon telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 16 (enam belas) Sasaran Strategis dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa bahwa 16 indikator sasaran atau 66,67% bermakna Baik Sekali, 7 indikator sasaran atau 29,17% bermakna Baik, dan 1 indikator sasaran atau 4.17% bermakna Kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 109,34%, Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 bermakna “Baik Sekali”.

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon atas Perjanjian Kinerja (PK) Kabupaten Cirebon tahun 2022 yang terdiri dari 16 (enam belas) sasaran disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rekapitulasi Capaian Sasaran

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon	Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif	258	258	100
2.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,18	7,40	103,06
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,44	12,28	98,71
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	72,24	72,47	100,32
4.	Menurunnya Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengalami Disfungsi Sosial	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon	1,90	2,01	105,79
5.	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	Rasio Kesempatan Kerja	58,03	63,79	109,93
6.	Meningkatnya Penyelesaian Pergesekan (Friksi) Antar dan Internal Umat Beragama	Persentase penyelesaian friksi/gesekan antar umat beragama	81	81	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
7.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,08	4,00	192,31
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	3,74	4,69	125,40
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,25	2,30	43,81
		Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,63	7,67	165,66
8.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	71,98	74,59	103,63
		Skor PPH Konsumsi	93,20	96,20	103,22
9.	Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Mantap (BAIK)	80,20	86,57	107,94
10.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	52,76	57,09	108,21
11.	Meningkatnya Kapasitas Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	17,36	20,08	115,66
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,35	3,34	99,70
12.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik dan Bersih	Nilai SAKIP	76,00	67,71	89,09
		Opini BPK terhadap LKPD	1,00	1,00	100
		Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	75,00	92,00	122,66
13.	Meningkatnya Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,08	3,43	111,36
14.	Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Jumlah Desa Mandiri	49	79	161,22
15.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Pelanggaran Perda	393	388	101,27
16.	Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	149,36	155,80	95,69
Rata-rata Capaian Kinerja					109,34

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama, secara umum capaian kinerja masing-masing dalam kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung adanya kerjasama yang sinergis dari seluruh jajaran perangkat daerah dan pihak-pihak lain yang terkait.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama, secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam kategori sangat berhasil

Namun demikian, ada 4 (empat) indikator kinerja yang belum mencapai target antara lain :

1. Harapan Lama Sekolah (HLS);
2. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
4. Nilai SAKIP;

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

Rencana Tindak Lanjut

Mencermati hasil pencapaian kinerja tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Cirebon akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mendorong masyarakat komunitas, akademik dan dunia usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Mempromosikan kegiatan kepariwisataan, budaya dan kesenian yang ada di Kabupaten Cirebon secara lebih terkoordinasi dan lebih masif dalam media informasi.
3. mengoptimalkan penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna;
4. peningkatan PDRB per kapita, maka akan diikuti dengan peningkatan HLS.

5. Dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP setiap perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon.
6. Pangsa pasar hasil industri olahan masih terbatas dan daya saing yang ketat sehingga menyulitkan dalam pemasarannya serta iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif bagi sektor industri olahan, oleh karena itu diperlukan promosi dan ekspansi yang cerdas untuk memenangkan persaingan usaha industri serta melakukan perhitungan yang matang sebelum melakukan kegiatan usaha industri olahan sehingga dapat memperkecil kerugian;
7. Penyusunan SPM dan SOP bagi setiap perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon baik yang memiliki fungsi pelayanan mikro dan makro, langsung dan tidak langsung kepada masyarakat.
8. Menyempurnakan keterkaitan/integrasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja yang dikembangkan secara mandiri;
9. Melakukan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 53 tahun 2014.
10. Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya untuk mencapai target tersebut dengan pemberian program BOS, PIP, BOP dan pembinaan terhadap satuan pendidikan untuk pengoptimalan pencapaian.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan

melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Cirebon.

Adapun prestasi Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2022 sebanyak 11 prestasi/penghargaan, sebagaimana daftar terlampir.

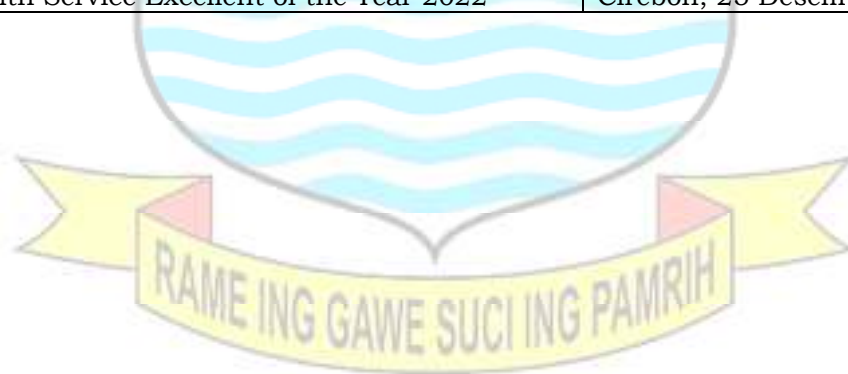


Lampiran



**Data Prestasi dan Penghargaan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Tahun 2022**

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan Waktu Penerimaan
1.	Penghargaan Kabupaten Informatif dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Jawa Barat 2022	Komisi Informasi Jawa Barat Bandung, 08 Desember 2022
2.	Penghargaan WTP Atas LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2021	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bandung, 25 November 2022
3.	Penghargaan Relawan Teknologi informasi dan Komunikasi (RTIK)	Gubernur Jawa barat Bandung, 8 Oktober 2022
4.	Anugerah Meritokrasi 2022	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Jakarta, 08 Desember 2022
5.	penghargaan nasional dalam acara Festival TIK (Festik) 2022 di Pontianak	Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Kalimantan Barat, 17 November 2022
6.	Penghargaan Penyelenggara Tata Kelola Data Terbaik Kabupaten dan Kota pada ajang Satu Data Jabar Awards Tahun 2022	Pemprov Jabar Bandung, 28 Oktober 2022
7.	Penghargaan PMDN/PMA terbaik	DPMPPTSP Cirebon, 26 Oktober 2022
8.	Penghargaan dalam ajang Festival Literasi Digital (Viral) Jawa Barat 2022	Gubernur Jawa Barat Bandung, 11 Oktober 2022
9.	Penganugerahan apresiasi wajib pajak teladan	Pemerintah Kabupaten Cirebon 15 Juni 2022
10.	Penghargaan Editor Choice 2.0 dari Tribun Jabar untuk kategori Pengembangan Wisata Desa	Bandung, 23 Mei 2022
11.	Penghargaan kategori "The Best Reliable Hospital of Health Service Excellent of the Year 2022	Indonesia Achievement Center Cirebon, 25 Desember 2022





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp./Fax (0231) 321643
SUMBER

KP. 45611

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 790/LHR. 613 /Inspr

Kami telah melakukan reviu atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Tahun 2022 terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sesuai Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini, mencakup beberapa hal berikut :

1. Masih terdapat target kinerja pada dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan suatu kinerja yang akan dicapai sesuai TUSI dan selaras dengan rencana kinerja unit kerja di atasnya, SMART, dan dilengkapi basis data yang memadai, dan perhitungan yang logis;
2. Dokumentasi/ evidence yang dilakukan dalam memenuhi Capaian Kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah belum tersusun dengan baik.
3. Dokumen Laporan Kinerja pada beberapa Perangkat Daerah belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan pada BAB 3.
4. Belum Seluruhnya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan dengan Kertas kerja yang memadai.

Terhadap permasalahan di atas, manajemen Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah berupaya menindaklanjuti secara berjenjang dengan melaksanakan serangkaian tindakan yang mengarah pada perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meskipun untuk penyelesaiannya masih memerlukan waktu.

Dikeluarkan di Sumber
Pada tanggal, 13 Maret 2022


**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON**
INSPEKTORAT
Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si., CGCAE,
Pembina Utama Muda
NIP. 19661209 199312 1 002



BUPATI CIREBON

**PERJANJIAN KINERJA
BUPATI CIREBON
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMRON

Jabatan : BUPATI CIREBON

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumber, 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON
TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon	Persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif	Persen Kelompok	84.00 258	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah(RLS) Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun Tahun	7.18 12.44	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,24	Dinas Kesehatan
4.	Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon	Persen	1,90	Dinas Sosial
5.	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	Rasio kesempatan kerja	Persen	58,03	Dinas Ketenagakerjaan
6.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	Persentase penyelesaian friksi/gesekan antar umat beragama	Persen	81	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen Persen Persen	2,08 3,74 5,25	Dinas Pertanian Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	4.63	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2. Dinas Pemuda Dan Olahraga, 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

8.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Poin	71,98	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Persen	93,20	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
9.	Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)	Poin	80,20	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Poin	52,76	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks kemandirian fiskal daerah	Poin	17,36	1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	3,35	Bagian Organisasi Setda
12.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih	Nilai SAKIP	Poin	76	Bagian Organisasi Setda
		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	1	Badan Keuangan dan Aset Daerah
13.	Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	Poin	75	Inspektorat
		Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Poin	3,08	Dinas Komunikasi dan Informatika
14.	Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah desa mandiri	Desa	49	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	Jumlah pelanggaran Perda	Kasus	393	Satuan Polisi Pamong Praja
		Menurunnya resiko bencana	Poin	149,36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 2.799.913.000,00
2.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 167.850.000,00
3.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 57.840.266.200,00
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 315.000.000,00
5.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 116.625.404.854,00
6.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 79.999.900,00

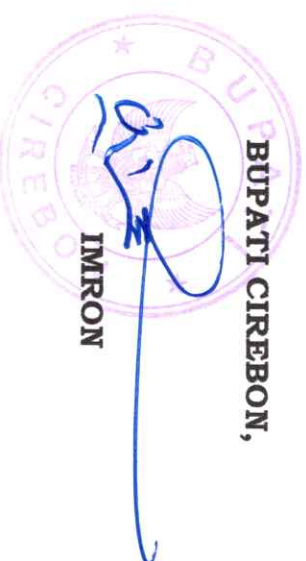
NO.	PROGRAM	ANGGARAN
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 199.999.300,00
8.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.796.748.975,00
9.	Program Penanganan Bencana	Rp. 286.716.500,00
10.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 11.243.500,00
11.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 1.243.318.990,00
12.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 1.524.157.725,00
13.	Program Penanganan Bencana	Rp. 131.720.795,00
14.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 155.620.900,00
15.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 4.849.632.100,00
16.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 900.310.275,00
17.	Program Hubungan Industrial	Rp. 401.003.100,00
18.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.882.545.300,00
19.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 1.170.319.600,00
20.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 531.522.600,00
21.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 362.125.800,00
22.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 190.734.200,00
23.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 83.268.800,00
24.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 1.306.593.800,00
25.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 2.819.890.700,00
26.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 211.820.200,00
27.	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 113.931.800,00
28.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 425.859.900,00
29.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 151.724.300,00
30.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 845.070.600,00
31.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional	Rp. 119.698.000,00
32.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 404.767.250,00
33.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 225.716.000,00
34.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 142.859.250,00
35.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 440.170.000,00
36.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedauletatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 112.348.100,00
37.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 670.744.700,00
38.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 161.199.500,00
39.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 181.011.800,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
40.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 13.250.261.438,00
41.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 92.193.270.222,00
42.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 37.575.875,00
43.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 345.613.600,00
44.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 258.547.150,00
45.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 123.332.400,00
46.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 72.187.800,00
47.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 21.502.700,00
48.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 2.805.482.900,00
49.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 92.667.275,00
50.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 4.213.610.730,00
51.	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 468.527.000,00
52.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 5.022.157.230,00
53.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.015.029.200,00
54.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 4.616.155.100,00
55.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 225.286.400,00
56.	Program Aplikasi Informatika	Rp. 3.838.005.240,00
57.	Program Penataan Desa	Rp. 157.336.400,00
58.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 6.524.980.952,00
59.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 622.163.000,00
60.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 287.065.550,00
61.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Rp. 10.248.277.300,00
62.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 3.246.638.300,00

Sumber, 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON





BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050/Kep.595 -Bappelitbangda/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagai dasar utama pelaksanaan penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 143).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kabupaten Cirebon, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050/KEP.595 -BAPPELITBANGDA/2022

TANGGAL : 8 November 2022

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2022

Misi 1: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
Tujuan 1 : <i>Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon</i>	Persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan	Jumlah jenis obyek budaya daerah yang lestari pada tahun berjalan/total jumlah jenis obyek budaya yang ada X 100%	Persen	84.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon
Sasaran 1 : <i>Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon</i>	Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif	Kelompok / Komunitas Kebudayaan yang aktif	Kelompok	258	-	-

Misi 2: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
Tujuan 2 : <i>Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas</i>	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	(Indeks Kesehatan X Indeks Pendidikan X Indeks Pengeluaran) ^{1/3} x 100	Poin	70.42	DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KESEHATAN	BPS
Sasaran 2 : <i>Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat</i>	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan	Tahun	7.18	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur	Tahun	12.44	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
Sasaran 3 : <i>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</i>	Umur Harapan Hidup (UHH)	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh sejak lahir yang dihitung melalui variabel anak lahir hidup dan anak masih hidup	Tahun	72,24	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
Tujuan 3 : <i>Mewujudkan Kesejahteraan Sosial</i>	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan/total jumlah penduduk X 100%	Persen	11,04	DINAS SOSIAL	BPS

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja/jumlah angkatan kerja X 100%	Persen	10,70	DINAS KETENAGAKERJAAN	DINAS KETENAGAKERJAAN
	PDRB Per Kapita	PDRB / jumlah Penduduk	Juta	24,95	DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	BPS
Sasaran 4 : <i>Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial</i>	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon	Jumlah PPKS yang tertangani / Total PPKS di Kabupaten Cirebon X 100%	Persen	1,90	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
Sasaran 5 : <i>Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja</i>	Rasio Kesempatan Kerja	Penduduk yang bekerja/ angkatan kerja X 100%	Persen	58,03	DINAS KETENAGAKERJAAN	DINAS KETENAGAKERJAAN

Misi 3: Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
Tujuan 4 : <i>Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama</i>	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Penghitungan terhadap indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama dalam suatu lingkungan sosial masyarakat	Poin	84	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
Sasaran 6 : <i>Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama</i>	Persentase penyelesaian friksi/gesekan antar umat beragama	Jumlah laporan friksi, gesekan antar umat beragama / Jumlah laporan friksi, gesekan antar umat beragama yang terselesaikan X 100%	Persen	81	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Misi 4 : Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
Tujuan 5 : <i>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</i>	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(PDRB pada tahun berkenaan – PDRB tahun sebelumnya)/ PDRB tahun sebelumnya X 100% (Penghitungan dari BPS)	Persen	4,61	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Indeks Gini	Tingkat kesenjangan pendapatan yang dihitung melalui variabel total pendapatan dan total pengeluaran per penduduk	Poin	0,33	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	–	Ribu Rupiah / Kapita / Tahun	10.891	DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	BPS
Sasaran 7 : <i>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan</i>	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	(PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya) / PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya	Persen	2,08	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
	Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	(PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya) / PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya	Persen	3,74	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya	Persen	5,25	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya	Persen	4.63	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sasaran 8 : <i>Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat</i>	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Ketersediaan energi masing-masing kelompok pangan/Angka Kecukupan Energi X 100	Poin	71.98	DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Konsumsi energi masing-masing kelompok pangan/Angka Kecukupan Energi X 100	Persen	93.20	DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
Sasaran 9 : <i>Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah</i>	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)	Jumlah sarana dan prasarana transportasi (jalan dan jembatan), sumber daya air (keberfungsian irigasi dan sungai), keciptakaryaan (cakupan air bersih, limbah domestik dan rumah layak huni) yang baik/total seluruh sarana dan prasarana wilayah X 100%	Poin	80.20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sasaran 10 : <i>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</i>	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Perhitungan terhadap indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan hutan	Poin	52,76	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Tujuan 6 : <i>Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Permen PAN RB No. 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi	Indeks	65	SEKRETARIAT DPRD, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BAGIAN ORGANISASI SETDA
Sasaran 11 : <i>Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik</i>	Indeks kemandirian fiskal daerah	Jumlah PAD/Jumlah pendapatan daerah x 100%	Poin	17.36	BADAN PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang	Poin	3.35	BAGIAN ORGANISASI SETDA	BAGIAN ORGANISASI SETDA

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
Sasaran 12 : <i>Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih</i>	Nilai SAKIP	Hasil penilaian dari Kemen PAN RB	Poin	76	BAGIAN ORGANISASI SETDA	BAGIAN ORGANISASI SETDA
	Opini BPK terhadap LKPD	Hasil penilaian dari BPK RI	WTP	1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	Hasil penilaian dari Korsupgah KPK RI	Poin	75	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
Sasaran 13 : <i>Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik</i>	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Hasil penilaian dari Kemen PAN RB	Poin	3,08	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sasaran 14 : <i>Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa</i>	Jumlah desa mandiri	Jumlah desa mandiri berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun	Desa	49	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	HASIL PEMUTAKHIRAN DATA IDM SETIAP TAHUN OLEH PARA PENDAMPING DESA

Misi 5 : Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
Tujuan 7 : <i>Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat</i>	Indeks ketertiban dan ketenteraman lingkungan	Laporan pelanggaran perda yang ditangani/ seluruh laporan pelanggaran perda	Persen	64,12	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sasaran 15 : <i>Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban</i>	Jumlah pelanggaran Perda	Jumlah kasus kriminalitas (kejahatan seksual, penganiyaan, pencurian) + Jumlah kejadian konflik sosial	Kasus	393	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target	Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
		(tawuran antar warga dan/atau antar pelajar)				
Sasaran 16 : <i>Menurunnya resiko bencana</i>	Indek resiko bencana	Bahaya X Kerentanan / Kapasitas (Hasil penilaian dari BNPB)	Poin	149,36	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BUPATI CIREBON,



IMRON